



PEMERINTAH
KOTA
SURAKARTA

PENYUSUNAN KAJIAN INDEKS DAYA SAING DERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2022



LAPORAN AKHIR



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN:

PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

SUB KEGIATAN:

**Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif**

PEKERJAAN:

Belanja Jasa Konsultansi

Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari Kegiatan Kajian Indeks Daya Saing Daerah ini yaitu untuk Menyusun Dokumen Kajian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surakarta Tahun 2022 yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi (1) Identifikasi dan pemetaan permasalahan daya saing Kota Surakarta tahun 2022; (2) Analisis perbandingan dan arah perubahan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2020 - 2022; (3) Proyeksi Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022 yang sejalan dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026; (4) Rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022; dan (5) Rekomendasi adaptasi ekonomi dan rekayasa sosial masyarakat Kota Surakarta pasca pandemi *Covid-19*.

Dengan menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangannya, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penyusunan ini.

Surakarta, Juni 2022

Walikota Surakarta

Gibran Rakabuming Raka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Kegiatan	5
C. Manfaat Kegiatan	5
D. Sasaran	5
E. Ruang Lingkup Kegiatan	5
F. Keluaran Kegiatan	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
A. Daya Saing Daerah	8
B. Indikator Utama Prinsip Daya Saing Daerah	9
C. Referensi Hukum	12
D. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta	14
E. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 31
A. Desain Penelitian	31
B. Populasi dan Sampel	31
C. Alat Analisis	31
D. Metode Pelaksanaan Pekerjaan	31
E. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	32
F. Keluaran/ Output	32
G. Sistematika Pelaporan	32
H. Kebutuhan Data Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022	33
 BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	 44
A. Kondisi Administrasi Wilayah	44
B. Kondisi Geografis	45
C. Kondisi Rencana Struktur Ruang	46
D. Kondisi Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta	47
E. Kondisi Perekonomian Daerah	48
F. Kondisi Demografis	53

G. Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026.....	54
H. Terobosan Strategi melalui Perencanaan Berbasis Penelitian dan Pembangunan Berbasis Perencanaan.....	57
BAB V ANALISIS DAYA SAING DAERAH	59
A. Identifikasi Peluang/ Kendala & Inventarisasi Urgensi	59
B. Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta 2022.....	60
C. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta 2020-2022	70
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Proyeksi Indeks Daya Saing Kota Surakarta tahun 2023.....	76
C. Rekomendasi	77
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai IDSD Kota Surakarta 2018-2021	3
Gambar 4.1 Peta Kota Surakarta	44
Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021	49
Gambar 5.1 Nilai Indeks Daya Saing Kota Surakarta 2020-2022	70
Gambar 5.2 IDSD Surakarta berdasarkan Aspek Tahun 2020-2022	71
Gambar 5.3 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar Tahun 2020-2022	72
Gambar 5.4 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Dukung Indikator IDSD 2022	33
Tabel 4.1 Nilai Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta	45
Tabel 4.2 Kondisi Topografi Kota Surakarta	46
Tabel 4.3 Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta Tahun 2011-2031	46
Tabel 4.4 Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta	47
Tabel 4.5 Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta	48
Tabel 4.6 PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah).....	50
Tabel 4.7 PDRB Kota Surakarta atas dasar Harga Konstan (juta rupiah)	51
Tabel 4.8 Distribusi PDRB Seri 2010 menurut Lapangan Usaha 2019-2021	52
Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017-2021	54
Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Kota Surakarta per Kecamatan Tahun 2021	54
Tabel 5.1 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Surakarta 2018-2020.....	59
Tabel 5.2 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (persen)	59
Tabel 5.3 Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta (Miliar Rupiah)	60
Tabel 5.4 Sebaran Level Daya Saing Kota Surakarta 2021-2022	61
Tabel 5.5 Perkembangan IDSD 2021-2022	61
Tabel 5.6 Nilai IDSD Kota Surakarta Tahun 2021-2022 berdasarkan Indikator	62
Tabel 5.7 Skor IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Aspek Tahun 2020-2022.....	70
Tabel 5.8 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar Tahun 2020-2022	71
Tabel 5.9 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi 2020-2022.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cakupan daya saing di tingkat regional (*regional competitiveness*) memasukkan berbagai faktor tolok ukur termasuk faktor pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, konvergensi dan divergensi regional, keragaman, serta dampak dari situasi regional (Chrobocinska, 2021). Luasnya cakupan tersebut kemudian dapat dimaknai secara luas bahwa daya saing berkaitan erat dengan pembangunan daerah serta stimulasinya, sehingga faktor daya saing mendorong pada faktor pembangunan regional begitu pula sebaliknya. Lebih dari itu, beberapa literatur menjadikan daya saing ini sebagai penanda keberlanjutan (*competitiveness index as evidence of sustainability*) bagi suatu negara atau daerah (Nogueira dan Madaleno, 2021; Judrupa, 2021; Koraus dkk., 2018). Oleh karena itu, daya saing bukan hanya diorientasikan pada indikator ekonomi saja, melainkan lebih dari itu daya saing tersebut diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata dan berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat di suatu daerah. Konektifitas yang kuat antara daya saing, pembangunan, dan paradigma keberlanjutan ini kemudian dijadikan salah satu landasan penyelenggaraan Indeks Daya Saing Daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Kemampuan untuk meningkatkan daya saing suatu daerah tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mengenali potensi dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing. Kemampuan suatu wilayah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional turut menjadi penentu daya saing. Lebih lanjut, transformasi dan akselerasi pembangunan haruslah bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas IPTEK, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing daerah yang pada gilirannya daya saing nasional (bangsa) juga turut meningkat.

Pengukuran anual Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indonesia telah dilaksanakan BRIN sejak tahun 2017 dengan acuan utama *Global Competitiveness Index* yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, meskipun tidak menutup sumber referensi pengukuran lain seperti *Asia Competitiveness Institute* (ACI) ataupun *Global Competitiveness Forum*. Penyelenggaraan IDSD mempertimbangkan interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di daerah masing-masing, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah

yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut. Ukuran kesejahteraan memiliki makna yang sangat luas, indikatornya dapat berupa produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita atau tingkat kesempatan kerja. Indeks Daya Saing Daerah dinilai mampu mengukur kemampuan bersaing satu region (provinsi/ kota/ kabupaten) terhadap region lain yang disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang baik di tingkat nasional maupun global (Parjaman dkk., 2019).

Isu yang diangkat dalam pengukuran daya saing daerah oleh BRIN selalu disesuaikan dengan perubahan pada tingkat yang lebih luas, seperti pada tahun 2019 yang mengangkat isu utama Polarisasi perdagangan global (*Global Risk Report, 2019*). Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 berfokus pada isu kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi global Covid-19. Kemudian berdasarkan ramalan (*outlook*), daya saing tahun 2022 akan dipengaruhi oleh 4 (empat) isu utama meliputi adaptasi ekonomi terhadap dampak pandemi, lingkungan, geopolitik, dan teknologi digital (*Global Risk Report 2022*). Tolok ukur daya saing dengan menggunakan faktor penguat, sumber daya manusia, faktor pasar, dan ekosistem inovasi pada IDSD BRIN sejauh ini bisa sejalan dengan isu-isu global.

Mengacu pada system penilaian Global Competitiveness Index oleh World Economic Forum, The World Competitiveness Yearbook oleh Institute for Management Development, European Competitiveness Index oleh European Commission tentang Daya Saing Daerah dan strategi Pembangunan oleh Asia Competitiveness Institute, dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia, maka penilaian IDSD tahun 2021 ditetapkan 4 aspek yang diklasifikasikan menjadi 12 pilar. Keempat aspek pokok yang dijadikan acuan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah meliputi:

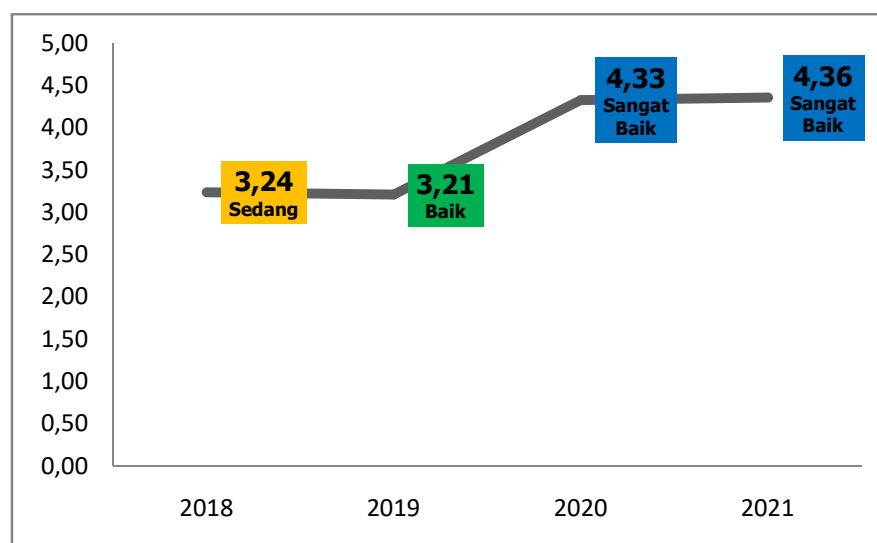
1. Aspek Ekosistem Inovasi: Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kapasitas Inovasi, dan Pilar Kesiapan Teknologi;
2. Aspek Penguat/Enabling Environment: Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, dan Pilar Perekonomian Daerah;
3. Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital: Pilar Kesehatan dan Pilar Pendidikan & Keterampilan;
4. Aspek Pasar/Market: Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar.

Kota Surakarta merupakan salah satu simpul penting pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Aktivitas ekonomi di kota ini yang didominasi oleh sektor

perdagangan menjadi bagian penting dari mata rantai bisnis di kawasan Soloraya secara khusus, maupun Jawa Tengah secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta berfluktuatif meskipun tidak ekstrem. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,78 persen, dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kota mengalami penurunan hingga mencapai minus 1,74 persen karena dampak pandemi. Kondisi Surakarta. Hal ini disebabkan adanya pandemic COVID 19 yang berdampak pada masalah Kesehatan, Sosial dan Ekonomi di semua lapisan masyarakat daerah.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Surakarta tahun 2021 didominasi oleh sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 10,69%, diikuti sektor akomodasi makanan dan minuman (kuliner) mencapai 9,79% persen. Berdasarkan data ini, maka kita bisa melihat bahwa tahun 2021 membawa Kota Surakarta mulai bangkit dari dampak perubahan pada ekonomi akibat pandemi covid-19 jika dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta tahun 2020. Meskipun hingga awal 2021 perekonomian kota Surakarta belum sepenuhnya pulih karena dampak pandemi covid-19, namun Kota Surakarta mampu bangkit hingga penutupan tahun 2021 bahkan terus bertumbuh pada triwulan pertama tahun 2022 (Bank Indonesia, 2022).

Surakarta menjadi salah satu kota berdaya saing tinggi dalam rentang 2019-2021 pada IDSD yang dirilis oleh BRIN, mengalami kemajuan dibanding tahun 2018. Tahun 2019 Surakarta memperoleh Skor Overall 7,71/12,00 menjadi Kota/ Kabupaten berdaya saing nomor 5 nasional. Keniaikan peringkat terjadi pada tahun 2020 dan 2021 di mana Kota Surakarta menempati peringkat 1 nasional dengan skor 4,33/5,00 dan 4,36/5,00 secara berturut-turut. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Surakarta untuk bertahan dan terus meningkatkan kemampuan daya saing di tahun 2022.



Gambar 1.1. Nilai IDSD Kota Surakarta Tahun 2018-2021

Dari hasil penilaian indeks daya saing tahun 2018-2021, penopang utama ekosistem inovasi kota Surakarta adalah Pilar Kelembagaan. Secara lebih spesifik, Kota Surakarta memiliki kesiapan yang baik dalam hal kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Keamanan dan keindahan, serta indeks Reformasi Birokrasi serta ditunjang oleh infrastruktur yang dindikasikan melalui rasio Panjang jalan dan elektrifikasi yang baik dan jumlah nilai investasi Berskala Nasional dilihat dari investasi PMDN.

Potensi daya saing Surakarta masih sangat besar mengingat isu global terkait adaptasi ekonomi terhadap dampak pandemi, lingkungan, geopolitik, dan teknologi digital sangat relevan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 yaitu "**Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera**". Terlebih lagi, urgensi daya saing dimuat secara khusus dalam misi RPJMD butir 1-7 yang berkaitan dengan daya saing, tata kelola pemerintahan, kolaborasi antar sektor dan paradigma ekonomi berkelanjutan.

Meskipun Surakarta telah menemukan relevansi antara RPJMD dengan kebijakan pembangunan nasional dan isu-isu global tahun 2022, implementasi kemampuan bersaing Surakarta dengan menggunakan tolok ukur Indeks Daya Saing Daerah versi BRIN tetap mendesak untuk mendapat perhatian lebih oleh lintas sektor. Perlu ada kesepahaman oleh pemangku kepentingan yang meliputi Pemerintah Kota Surakarta, sektor industri, masyarakat, akademik, bahkan media masa sehingga tercipta kolaborasi yang berjalan pada jalur yang sama yaitu keunggulan kompetitif Kota Surakarta.

Indeks Daya Saing Daerah merupakan suatu keharusan untuk dipelajari dan dirumuskan bersama secara mendalam dan komprehensif melibatkan kelima pemangku kepentingan. Meskipun bukan sebagai inisiator tunggal dan menutup peran pemangku kepentingan yang lain, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan dan menghimpun seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2022. Kajian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta ini merupakan sebuah riset dengan desain kuantitatif dengan metode dokumentasi dan focus group discussion. Metode dokumentasi menggunakan data-data berupa dokumen regulasi dan kebijakan dari berbagai Perangkat Daerah dan metode survey dilakukan untuk mendapatkan beberapa data primer terkait dengan pilar ukuran pasar, kesiapan teknologi, dinamika bisnis dan kapasitas inovasi. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menghitung nilai dan skor indeks daya saing Kota Surakarta.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 antara lain adalah:

1. Mengetahui capaian indikator indeks daya saing daerah Kota Surakarta sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan oleh BRIN;
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi Kota Surakarta dalam pencapaian indikator indeks daya saing daerah tahun 2022; dan
3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan sebagai acuan dan dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kota Surakarta.

C. Manfaat Kegiatan

Kajian ini diarahkan untuk memberikan manfaat yaitu:

1. Sebagai dasar penyusunan indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2022;
2. Sebagai rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2022; dan
3. Sebagai dasar analisis perkembangan daya saing Kota Surakarta dari tahun 2020-2022.

D. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Kota Surakarta adalah:

1. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan daya saing daerah Kota Surakarta;
2. Mengukur Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022; dan
3. Membandingkan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2020-2022.

E. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penyusunan kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022 antara lain adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan daya saing Kota Surakarta tahun 2022;
2. Menganalisis perbandingan dan arah perubahan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2021 dan 2022;
3. Menyusun proyeksi Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023 yang sejalan dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026; dan
4. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022.

F. Keluaran Kegiatan

Keluaran atau *output* yang diharapkan dari hasil kegiatan penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta ini adalah tersusunnya dokumen Kajian Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2022 yang komprehensif dan berkualitas. Adapun dokumen Kajian IDSD Tahun 2022 tersebut yang memuat:

1. Laporan pengukuran Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022;
2. Proyeksi Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023; dan
3. Rekomendasi kebijakan terkait hasil Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daya Saing Daerah

Keberlanjutan merupakan salah satu prioritas utama dalam lingkup strategi, rencana pembangunan, dan dokumen-dokumen normatif lainnya di berbagai negara yang kemudian kebanyakan diadaptasikan pada skala regional termasuk kota atau kabupaten (Chrobocinska, 2021). Konsep keberlanjutan tersebut kemudian memiliki ketereratan dengan daya saing. Peningkatan daya saing suatu kota dapat mengarah pada pembangunan berkelanjutan bagi regional provinsi maupun negara, walaupun daya saing sebuah provinsi dan negara tidak serta merta dicapai melalui tingkat pembangunan yang sama persis antar masing-masing daerah. Oleh karena itu, menjadi tugas yang sangat penting untuk memperhatikan disparitas antar wilayah, sekaligus menjadikan masing-masing wilayah menjadi tempat tinggal dan lahan menarik bagi investor dengan menonjolkan keunggulan masing-masing wilayah serta mempertimbangkan faktor penghambat perkembangan suatu wilayah tertentu. Identifikasi keunggulan dan faktor penghambat inilah yang menjadi tolok ukur kemampuan bersaing suatu daerah (Judrupa, 2021). Dengan demikian secara esensial daya saing bukan hanya masalah ekonomi makro, melainkan kemampuan bersaing di tingkat regional, perkotaan dan lingkup yang lebih lokal lagi (Parjaman dkk., 2019).

Ketels (2016) membedakan definisi daya saing antara yang berpusat pada biaya dan yang berpusat pada produktivitas. Daya saing yang berpusat pada biaya tergantung pada biaya produksi unit di tempat tertentu; biaya produksi per unit yang rendah memungkinkan daerah untuk bersaing di pasar global. Sebaliknya, daya saing produktivitas bergantung pada kapasitas suatu tempat untuk menambah nilai berdasarkan faktor produksi, dengan kata lain seberapa produktif tempat itu. Faktor produktif, seperti tenaga kerja dan modal, berpindah antar daerah dan terjadi transmisi dan sinergi antar daerah, sehingga struktur ekonomi daerah berbeda dengan struktur ekonomi nasional. Dengan kata lain, wilayah tidak sesuai dengan versi ekonomi nasional yang lebih kecil, karena mereka berbeda secara struktural.

Definisi daya saing dalam perspektif modern, secara implisit dapat dilihat melalui kacamata “daya saing perusahaan”. Dengan demikian “daya saing negara” atau “daya saing daerah” terdapat korelasi bahwa di sana ada hubungan antara konsep kinerja perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan konsep bahwa kapasitas suatu negara atau daerah dapat menghasilkan kesejahteraan bagi penduduknya (Catalan, 2021). Sementara itu, *World Economic Forum* (WEF) mendefinisikan daya saing negara atau daerah sebagai “seperangkat

institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara atau daerah” dan mengakui bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk (Schwab, 2017). Bagi *IMD World Competitiveness Center*, daya saing negara atau daerah didefinisikan sebagai “kemampuan suatu bangsa atau region untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang menopang penciptaan nilai lebih bagi perusahaannya dan lebih banyak kemakmuran bagi rakyatnya” (IMD, 2018).

Porter (2003) mengakui bahwa banyak penelitian tentang daya saing telah difokuskan pada skala nasional, tanpa mengakui perbedaan internal antar wilayah, yang ada di semua negara. Ia mengemukakan bahwa komponen utama yang menentukan kinerja ekonomi adalah komponen regional, seperti input khusus, infrastruktur, pendidikan angkatan kerja, institusi yang akan mendorong aglomerasi perusahaan dalam bentuk klaster.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian daripada kemampuan sektor swasta atau perusahaan.
- b) Pelaku ekonomi (*economic agent*) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.
- c) Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup mempertimbangkan hal-hal diatas, akhirnya PPSK-BI mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah dkk, 2002).

B. Indikator Utama Prinsip Daya Saing Daerah

Banyak faktor yang penentu mendorong produktivitas dan daya saing, memahami faktor dibalik proses ini telah menduduki pikiran ekonom selama ratusan tahun, melahirkan teori-teori mulai dari Adam Smith yang fokus pada spesialisasi dan pembagian kerja, penekanan ekonom neo-klasik pada investasi dalam modal fisik dan infrastruktur, dan yang baru tertarik pada pendidikan, pelatihan, kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi makro, tata pemerintahan yang baik, kecanggihan perusahaan, efisiensi pasar dan lain-lain (GCI, 2014). Sementara semua faktor-faktor diatas mungkin penting, dari berbagai literatur, teori ekonomi, serta berbagai diskusi, indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem keuangan, (4) Infrastruktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) Governance dan kebijakan pemerintah, (9) Manajemen dan ekonomi mikro (Abdullah dkk, 2002). Masing- masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi modal, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip berikut:

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan

daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
- b. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.
- c. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara efisien ke seluruh penjuru dunia.
- d. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional.

3. Sistem Keuangan

Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk fasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan mempengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
- b. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Dalam hal ini infrastruktur merupakan indikator seberapa besar daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi

yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
- b. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
- c. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, hukum dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut.

- a. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
- c. Aktivitas perekonomian daerah suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Governance dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum

pengaruh faktor governance dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat disarikan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
- b. Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
- c. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah.
- d. Efektivitas pemerintah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.
- e. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung.

9. Manajemen dan Ekonomi Mikro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Adapun prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah di antaranya adalah:

- a. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
- b. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah di mana perusahaan tersebut berada.
- c. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
- d. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
- e. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

C. Referensi Hukum

Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan sehingga dapat berjalan secara harmonis dengan arah kebijakan baik yang disusun dalam ruang lingkup regional kota/ kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan daya saing dan keberlanjutan yang harmonis dari tingkat nasional,

provinsi, hingga produk kebijakan tingkat Kota Surakarta dijadikan sebagai rujukan. Landasan hukum yang digunakan dalam pekerjaan ini meliputi:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual dan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;

16. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
17. Peraturan Wali Kota Surakarta No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021.

D. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta

Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta menjadikan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2021-2026 sebagai pegangan utama.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun kebijakan terkait dengan isu strategis pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Isu strategis berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan adalah:

- 1) Pemetaan sumber daya aparatur berbasis sistem merit
- 2) Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
- 3) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat
- 4) Optimalisasi layanan fungsi DPRD
- 5) Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektornik
- 6) Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- 7) Penguatan kerja sama regiona, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan kelompok masyarakat
- 8) Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik

- 9) Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran, dan pemanfaatan inovasi daerah
- 10) Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter, unggul dan tangguh

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- c. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing
- d. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja
- e. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
- f. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- g. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan
- h. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perkembangan ekonomi dalam era industri 4.0 dibutuhkan sebagai salah satu perkembangan industri yang harus diikuti. Seiring dengan perkembangan era industri 4.0, Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan aspek perkembangan sejarah kuno dan kini yang telah terjadi, untuk melihat kondisi nanti perkembangan dan daya saing ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan era industri 4.0 yang terjadi mengakibatkan perkembangan dunia digital/cyber berlangsung secara cepat. Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan

dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep Eco Cultural City
- b. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart City
- c. Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor
- d. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan
- e. Peningkatan daya tarik investasi
- f. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi
- g. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya
- b. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi
- c. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat
- d. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim

5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

- 1) Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- 2) Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana

Sementara itu, fokus prioritas makro tersebut diintegrasikan dalam perincian tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta. Perincian tema dan arah kebijakan RPJPD antara lain sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemenuhan layanan kesehatan dan Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19;
- b. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan jaminan sosial;
- c. Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
- d. Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif;
- e. Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;
- f. Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Pengentasan Kemiskinan
 - 6) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
 - 7) Pengembangan sistem pendidikan pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
 - 8) Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2022 berjalan normal, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Budaya**

yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan inovatif” dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- b. Pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas;
- c. Pendampingan intensif *start up*, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (Wiskulja);
- d. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *length of stay* (LoS; lama tinggal) kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan
 - 6) Pengentasan Kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- e. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern;
- f. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- g. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal; dan
- i. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Dengan berdasarkan pada asumsi tahun 2022 dan 2023 sudah ada penambahan investor; birokrasi sudah cakap memasarkan potensi kota (seni budaya, kekayaan budaya tak benda), *start up* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Budaya Modern yang Inklusif dan Ramah Lingkungan Berbasis Kolaborasi Lintas komponen”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- c. Melanjutkan *smart governance*: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- e. Melanjutkan Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan
 - 6) Pengentasan Kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- f. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal;
- g. Penurunan kemiskinan dengan berbasis usaha mikro dan jaringan sosial; dan
- h. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada pendampingan usaha mikro.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2023 dan 2024 proyek infrastruktur pendukung kota budaya modern sudah ada yang selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta sudah naik, *start up* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- b. Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- c. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- d. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan
 - 6) Pengentasan Kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
- e. Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota;
- f. Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;
- g. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- h. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan

- i. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2024 dan 2025 proyek infrastruktur pendukung kota budaya modern sudah selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Surakarta sudah naik, *start up* pemuda sudah bertambah, gotong royong masyarakat bertambah banyak jenisnya, ekspor naik volumenya, kampung wisata sudah bertumbuh, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis komunitas untuk memantapkan kota budaya yang sejahtera”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- c. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- d. Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- e. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- f. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - 1) Meningkatkan *LoS* kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan perumahan
 - 6) Pengentasan kemiskinan
 - 7) Mewujudkan *smart city*
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.

- g. Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan *smart economy*;
- h. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045;
- i. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin; dan
- j. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis data digital, inklusif, dan mendukung Surakarta kota budaya modern.

E. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah

Penilaian IDSD tahun 2022 ditetapkan 4 aspek yang diklasifikasikan menjadi 12 pilar. Empat aspek Indeks Daya Saing Daerah antara lain aspek ekosistem inovasi, aspek penguat, aspek sumber daya dan aspek pasar menurut Kemenristekbrin (2021). Keempat aspek ini diperinci menjadi 12 pilar , 23 dimensi dan 97 indikator pengukuran yang menyertainya. Keempat aspek pokok yang dijadikan acuan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah meliputi:

1. Aspek Ekosistem Inovasi: Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kapasitas Inovasi, dan Pilar Kesiapan Teknologi.
2. Aspek Penguat/*Enabling Environment*: Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, dan Pilar Perekonomian Daerah
3. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*: Pilar Kesehatan dan Pilar Pendidikan & Keterampilan
4. Aspek Pasar/*Market*: Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar

1. ASPEK EKOSISTEM INOVASI

1.1. Pilar dinamika bisnis

1.1.1. Dimensi Regulasi

Regulasi dan Reformasi Birokrasi (kemudahan izin usaha dan investasi) yang memiliki dampak pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah terdiri dari beberapa pertanyaan berikut ini.

- 1) Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?

- 2) Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?
- 3) Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?
- 4) Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?

1.1.2. Dimensi Kewirausahaan

Dimensi kewirausahaan untuk mengukur mengenai pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar. Dampak dari dimensi kewirausahaan ini terlihat pada perubahan PAD, APBD, PDRB, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang perlu diidentifikasi pada dimensi kewirausahaan antara lain:

- 5) Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?
- 6) Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)
- 7) Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO))
- 8) Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)
- 9) Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?
- 10) Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?

1.2. Pilar Kapasitas Inovasi

1.2.1. Dimensi Interaksi dan Keberagaman

Memaksimalkan potensi daerah (Sinergi ABG+C) untuk memberi dampak pada pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Dimensi kewirausahaan pada pilar kapasitas inovasi terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu:

- 11) Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?
- 12) Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?
- 13) Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program

pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)

- 14) Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?
- 15) Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)
- 16) Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?

1.2.2. Dimensi Penelitian dan Pengembangan (R&D)

Membangun kapasitas inovasi daerah penciptaan budaya inovasi daerah berkelanjutan. Indikator dari dimensi penelitian dan pengembangan pada pilar kapasitas inovasi yaitu:

- 17) Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?
- 18) Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?
- 19) Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?
- 20) Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?
- 21) Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?
- 22) Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?
- 23) Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?

- 24) Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)
- 25) Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?
- 26) Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?

1.2.3. Dimensi Komersialisasi

Komersialisasi inovasi dari produk unggulan daerah. Dimensi ini terdiri dari 2 indikator yaitu:

- 27) Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?
- 28) Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?

1.3. Pilar Kesiapan Teknologi

1.3.1. Dimensi Telematika

Kesiapan Infrastruktur digital dan informatika yang berdampak pada kapasitas SDM era Digital. Indikator dimensi ini adalah:

- 29) Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?
- 30) Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?

1.3.2. Dimensi Teknologi

Tingkat Kesiapan Inovasi yang berdampak terhadap komersialisasi Inovasi. Indikator dimensi ini antara lain:

- 31) Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?

2. ASPEK FAKTOR PENGUAT/ENABLING ENVIRONMENT

2.1.1. Pilar Kelembagaan

2.1.1. Dimensi Tata Kelola Pemerintah

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah yang baik {Good Governance} yaitu tingkat partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder {pelayanan } dan konsensus {kesepakatan bersama}. Pencapaian indikator dimensi tata kelola pemerintah ini akan memberikan dampak pada tingkat kepercayaan masyarakat, tingkat kepercayaan investor, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, dan penciptaan lapangan kerja. Indikator dimensi tata kelola pemerintah pada pilar kelembagaan antara lain:

- 32) Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?

- 33) Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?
- 34) Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?
- 35) Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?
- 36) Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?
- 37) Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi

2.1.2. Dimensi Keamanan dan Ketertiban

Penegakan supremasi hukum dalam mendukung Good Governance demi terciptanya situasi yang kondusif dalam mendukung program pembangunan daerah. Dimensi keamanan dan ketertiban terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 38) Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)?
- 39) Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?

2.2. Pilar Insfrastruktur

2.2.1. Dimensi Infrastruktur Transportasi

Mengukur kesiapan infrastrutur jalan di daerah dalam kondisi baik untu dapat melihat keuntungan/kerugian baik secara materiil dan non materiil. Indikator dimensi ini terdiri dari:

- 40) Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?
- 41) Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?

2.2.2. Dimensi Infrastruktur Air Bersih, RTH Dan Kelistrikan

Mengukur kebutuhan dasar masyarakat yaitu kebutuhan infrastruktur primer dan kesehatan masyarakat. Indikatornya yaitu:

- 42) Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?
- 43) Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?
- 44) Berapa rasio elektrifikasi?

2.3. Pilar Perekonomian Daerah

2.3.1. Dimensi Keuangan Daerah

Mengukur kemampuan keuangan daerah untuk melihat tingkat keberlanjutan pembangunan daerah. Dimensi ini terdiri dari beberapa indikator yaitu:

- 45) Berapa besar pertumbuhan ekonomi?
- 46) Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?

- 47) Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?
- 48) Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?

2.3.2. Dimensi Stabilitas Ekonomi

Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada stabilitas Ekonomi, Sosial, Hukum dan Keamanan. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 49) Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?
- 50) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?
- 51) Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?
- 52) Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?
- 53) Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?
- 54) Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?
- 55) Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?

3. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA/HUMAN CAPITAL

3.1. Pilar Kesehatan

3.2.1. Dimensi Kesehatan

Mengukur tingkat kesehatan masyarakat yang berdampak pada kesiapan sumber daya manusia. Indikator dimensi kesehatan ini adalah:

- 56) Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?
- 57) Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?
- 58) Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?
- 59) Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?
- 60) Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?
- 61) Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?
- 62) Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?

- 63) Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?

3.2. Pilar Pendidikan dan Keterampilan

3.2.1. Dimensi Pendidikan

Mengukur tingkat pendidikan formal yang berdampak pada kapasitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 64) Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?
- 65) Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?
- 66) Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?
- 67) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?
- 68) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?
- 69) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?
- 70) Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?

3.2.2. Dimensi Keterampilan

Membangun kualitas SDM terampil untuk meningkatkan kapasitas SDM yang berdaya saing. Indikator dimensi keterampilan pada pilar ini yaitu:

- 71) Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?
- 72) Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?
- 73) Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?
- 74) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?

4. ASPEK PASAR/ MARKET

4.1. Pilar Efisiensi Pasar Produk

4.1.1. Dimensi Kompetisi Dalam Negeri

4.1.2. Dimensi Pajak dan Retribusi

Kondisi iklim usaha, persaingan dan investasi (pelaku pasar) yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 75) Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)

- 76) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?
- 77) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?
- 78) Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?

4.1.3. Dimensi Pajak dan Retribusi

Kontribusi pajak dan retribusi untuk PAD untuk melihat dampaknya terhadap keseimbangan keuangan Daerah. Dimensi ini memiliki beberapa indikator antara lain:

- 79) Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
- 80) Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

4.1.4. Dimensi Stabilitas Pasar

Stabilitas perekonomian Daerah untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap keseimbangan perekonomian Daerah. Dimensi stabilitas pasar terdiri dari dua indikator yaitu:

- 81) Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?
- 82) Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?

4.2. Pilar Ketenagakerjaan

4.2.1. Dimensi Ketenagakerjaan

Dimensi ketenagakerjaan bisa dilihat dari kondisi angkatan kerja (jumlah pengangguran), kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja dan kesetaraan gender. Dimana dimensi ini berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian dan stabilitas keamanan ketertiban. Dimensi ini terdiri dari tiga indikator yaitu:

- 83) Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?
- 84) Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)
- 85) Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?

4.2.2. Dimensi Kapasitas Tenaga Kerja

Membangun kapasitas SDM yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas perekonomian dan stabilitas keamanan ketertiban. Dimensi ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 86) Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?
- 87) Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?
- 88) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?

4.3. Pilar Akses Keuangan

4.3.1. Dimensi Akses Keuangan

Kemudahan akses modal/keuangan yang berdampak pada tumbuhnya unit-unit usaha dan investasi. Indikator dari dimensi ini yaitu:

- 89) Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?
- 90) Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?
- 91) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?
- 92) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?
- 93) Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?
- 94) Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?

4.4. Pilar Ukuran Pasar

4.4.1. Dimensi Ukuran Pasar

Dimensi dan luas Pasar yang berdampak peningkatan volume perdagangan dan ekspansi pasar. Indikator dimensi ukuran pasar yaitu:

- 95) Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)
- 96) Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?
- 97) Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?

BAB III

METODE KEGIATAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan metode survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Desain penelitian survei yang dipergunakan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan dan penerapan teknologi dalam praktek bisnis di Kota Surakarta.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas dan lembaga, serta stakeholder yang relevan dengan pengukuran indeks daya saing daerah di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

C. Alat Analisis

Kajian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif.
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiono (2005:142).
2. Analisis Indeks Daya Saing Daerah
Mengukur tingkat daya saing daerah berdasarkan komponen daya saing daerah tahun 2022 diukur dengan 4 Aspek, 12 Pilar. Dari keempat aspek dan keduabelas pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula.

D. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

Metode yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Tahap Persiapan adalah tahapan dalam rangka penyusunan TOR/kerangka acuan kerja, dan penetapan pekerjaan

2. Tahapan Penyusunan laporan pendahuluan, yaitu kegiatan perumusan permasalahan dan kondisi umum wilayah, dan metode pelaksanaan pekerjaan
3. Tahapan penyusunan laporan antara, yaitu kegiatan pengumpulan data, Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data, Analisis terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian evaluasi
4. Tahapa penyusunan Draft Laporan Akhir, yaitu pembahasan draft laporan akhir sebelum menjadi Buku Laporan akhir
5. Tahap penyusunan Laporan Akhir, yaitu Kajian Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Surakarta

E. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pelaksanaan kegiatan belanja Konsultasi Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dilaksanakan dan diselesaikan selama 58 hari (Lima puluh delapan) hari kerja.

F. Keluaran/ Output

Keluaran atau *output* yang diharapkan dari hasil kegiatan penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta ini adalah dokumen yang memuat:

1. Laporan pengukuran Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022;
2. Proyeksi Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2023; dan
3. Rekomendasi kebijakan terkait hasil Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta tahun 2022.

G. Sistematika Pelaporan

Jenis laporan yang dihasilkan dari Kegiatan Kajian pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu:

1. Laporan Pendahuluan
Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah, maka laporan pendahuluan yang disusun harus mampu memberikan gambaran yang jelas kepada pemberi pekerjaan berkaitan dengan konsep dan metode pelaksanaan dan penanganan pekerjaan yang akan dilakukan oleh pemberi pekerjaan. Secara garis besar laporan pendahuluan minimal berisi: (1) Gambaran tentang pekerjaan; (2) Metodologi yang dipakai; (3) Tenaga Ahli yang dipakai; dan (4) Time Schedule Pekerjaan. Draft Laporan pendahuluan untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar. Laporan pendahuluan dicetak sebanyak 5 buku ukuran A4, diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan pendahuluan.
2. Laporan Antara

Laporan antara merupakan hasil kegiatan pengumpulan data, Pemilihan data, Pengesahan data, Pengolahan data, Analisis terhadap hasil pengolahan data serta penyusunan hasil analisis dalam laporan kajian Evaluasi. Draft Laporan antara untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar. Laporan antara dicetak sebanyak 5 buku ukuran A4, diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan antara.

3. Laporan Akhir

Laporan akhir merupakan hasil Kegiatan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah yang mencakup keseluruhan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Draft Laporan akhir untuk Pembahasan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sejumlah 25 (dua puluh lima) eksemplar.

Laporan Akhir dicetak sebanyak 10 buku ukuran A4 dan Soft Copy dalam bentuk CD (Compact Disk) sebanyak 5 keping, executive summary sebanyak 5 buku diserahkan setelah dilaksanakan pembahasan draf laporan akhir

H. Kebutuhan Data Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2022

Mengacu pada panduan penyusunan yang diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, indikator-indikator penilaian IDSD Tahun 2022 diperoleh dari data-data relevan seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.1 Data Dukung Indikator IDSD 2022.

Tabel 3.1 Data Dukung Indikator IDSD 2022

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perijinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	Regulasi yang Dijadikan Pedoman dalam Menentukan Besaran Biaya Administrasi Perijinan Industri
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industri?	Rata-Rata Durasi Waktu Pengurusan Administrasi Perijinan Usaha
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha dari Tahun Sebelumnya

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
4	Berapa persentase usaha/industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	Persentasi Industri yang Memanfaatkan Kebijakan Insentif Pajak
5	Bagaimana Presentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Kecil dan Menengah
6	Bagaimana presentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri Besar
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	Sistern Manajemen Produksi Hasil Industri Kecil dan Menengah (SOP, ISO, dll)
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar? (dalam bentuk sertifikat ISO)	Sistem Manajemen Produksi Hasil Industri Besar (SOP, ISO, dll)
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	Jumlah Perusahaan Sosial yang Terdaftar oleh Pemerintah Daerah
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	Jumlah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi/ Startup yang terdaftar di Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Balitbangda dan Swasta
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	Implementsi Program Sistem Inovasi Daerah
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan	Keberadaan dan Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
	kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara perguruan tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Lembaga dan Litbang dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Perjanjian Kerjasama Antara Industri/ Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah untuk Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
15	Berapa jumlah kolaborasi antara perguruan tinggi dan atau Lembaga litbang, industri/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	Jumlah Kolaborasi Perguruan Tinggi, Litbang. Industri dan Pemerintah Daerah (Triple-Helix) Bidang Teknologi dan Inovasi dalam 2 Tahun Terakhir
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah tahun terakhir?	Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun Terakhir
17	Berapa jumlah Jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	Jumlah Artikel Ilmiah Jurnal yang Dihasilkan oleh Perguruan Tinggi yang Dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/ Internasional Selama 3 Tahun Terakhir

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah penelitian yang dihasilkan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir
19	Berapa Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	Jumlah Hak Cipta, Merek, Paten, dan Rahasia Dagang yang sudah Didaftarkan
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	Jumlah Paten yang Telah Dimanfaatkan Industri
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	Persentase Anggaran Penelitian dan Pengembangan terhadap Total APBD
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis produk unggulan daerah terhadap jumlah penelitian dari perguruan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
23	Berapa persentase jumlah peneliti di perguruan tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Berbasis Produk Unggulan Daerah terhadap Jumlah Penelitian
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	Peringkat Perguruan Tinggi di Daerah Secara Nasional (Diambil yang Tertinggi)

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	Jumlah Dunia Usaha dan Industri yang Memiliki Unit Penelitian dan Pengembangan
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	Jumlah Perguruan Tinggi dan Institusi dan Kelitbangan di Daerah yang Telah Melakukan Komersialisasi Inovasi
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	Kondisi Technopark dan Pusat Unggulan Iptek
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ Smartphone
30	Berapa Proporsi rumah tangga dengan akses internet?	Proporsi Rumahtangga dengan Akses Internet
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?	Jumlah Inovasi Teknologi di Daerah
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	Hasil Penetapan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Hasil Indeks Reformasi Birokrasi
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	Sistern Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
35	Apakah hasil hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
	dan RB?	
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tingkat Provinsi
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi?	Indeks Demokrasi Indonesia di Tingkat Provinsi
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)?	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)?	Persentase Penegakan Peraturan Daerah
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor?	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kendaraan Bermotor
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	Rasio Panjang Jalan Kondisi Baik Dibanding Total Panjang Jalan
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak?	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	Persentase Koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH)
44	Berapa rasio elektrifikasi?	Rasio Elektrifikasi
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	Pertumbuhan Ekonomi
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah?	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
47	Berapa persentase penurunan/peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun	Persentase Peningkatan APBD terhadap PDRB-ADHB dari Tahun Sebelumnya

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
	sebelumnya?	
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	Nilai PDRB Per kapita ADHB
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data Terakhir?	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional untuk Penanaman Modal Asing (PMA)
52	Berapa Persentase peningkatan/penurunan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	Persentase Peningkatan UMKM terhadap UKM
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan dari tahun terakhir?	Persentase Angka Kemiskinan
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP)?	Nilai Tukar Petani
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun terakhir?	Indeks Ketahanan Pangan
56	Berapa Persentase balita gizi buruk tahun terakhir?	Persentase Balita Gizi Buruk
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting tahun terakhir?	Persentase Jumlah Balita Stunting
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	Angka Kematian Bayi/ Balita per 1000 Kelahiran Hidup
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Angka Kesakitan/ Morbiditas

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
60	Berapa nilai angka harapan hidup tahun terakhir?	Angka Harapan Hidup Tahun Terakhir
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk tahun terakhir?	Rasio Dokter dan Medis Per 100.000 Penduduk
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	Angka Harapan Lama Sekolah
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	Rata-Rata Lama Sekolah
66	Berapa Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi?	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan Diploma I/ II/ III
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan D4/ S1
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Penduduk Berpendidikan S2
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan S3
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa Sekolah Menengah kejuruan?	Angka Partisipasi Kasar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	Kenaikan Jumlah Program Latihan BLK 2 Tahun Terakhir
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Produk
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)	Pola dan Karakteristik Kemitraan Antar Perusahaan (Kecil, Menengah dan Besar)
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?	Persentase Kelembagaan Gapoktan yang Aktif
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Asosiasi Pedagang Pasar yang Aktif
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	Persentase Kelembagaan Pelaku UMKM yang Aktif
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Rasio Rumah Sakit Umum per 100.000 Penduduk
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	Kontribusi Retribusi Daerah dalam PAD
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	Regulasi Pemerintah Daerah yang Mendorong Efisiensi Pasar dan Menekan Laju Inflasi Daerah
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Indeks Gini)

No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)?	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	Indeks Pembangunan Gender
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Terdidik Terhadap Total Angkatan Kerja
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	Persentase Pekerja Penuh Waktu dalam Seminggu
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tenaga Kerja Terampil
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	Jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	Persentase Jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
93	Berapa Persentase Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan Kredit

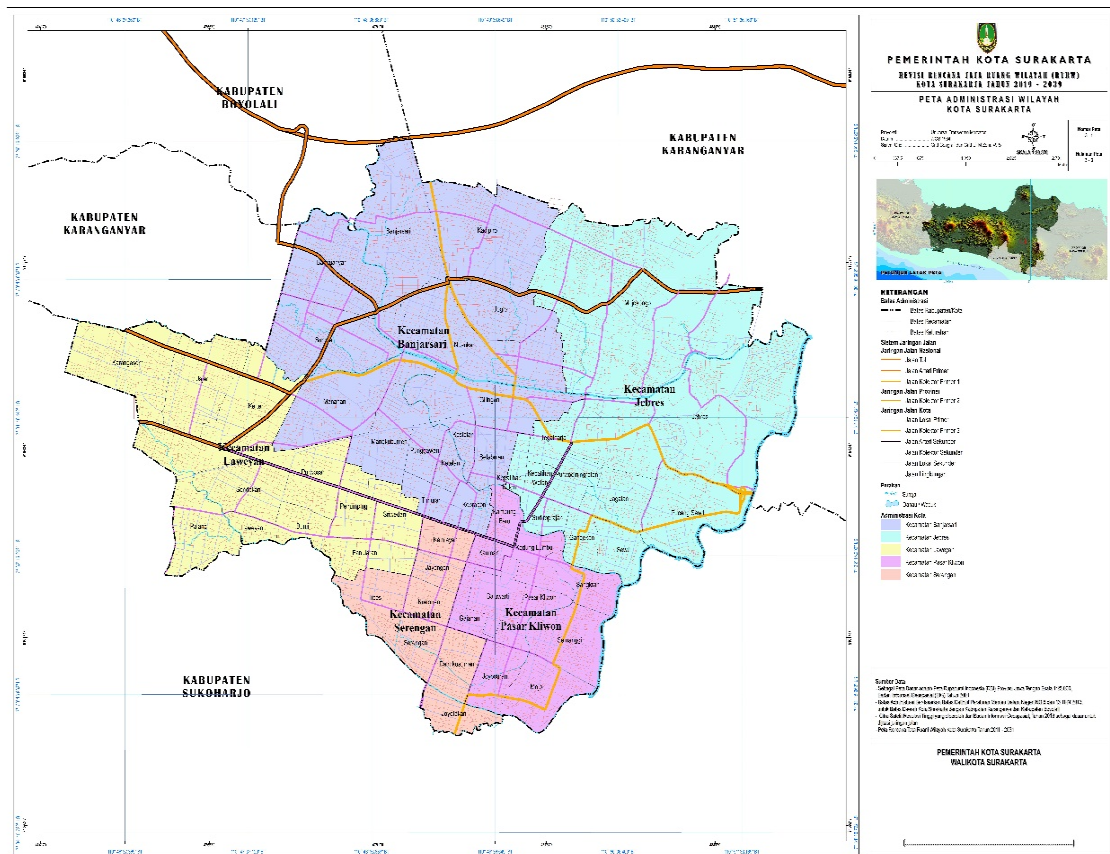
No.	INDIKATOR	DATA DUKUNG
	Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?	Lembaga Keuangan Mikro Kepada Petani/ Nelayan
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	Ketersediaan Modal Ventura Bagi Struktur Permodalan Koperasi dan UKM
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun ke Atas
96	Bagaimana pertumbuhan nilai ekspor?	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah Provinsi (triliun rupiah)?	Persentase Nilai Neraca Volume Perdagangan

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Kondisi Administrasi Wilayah

Kota Surakarta terletak antara 110°45'15" – 110°45'35 Bujur Timur dan 7°36'00" – 7°56'00" Lintang Selatan. Wilayah ini termasuk dataran rendah dengan ketinggian $\pm$ 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes, Anyar dan Bengawan Solo. Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW).

Gambar 4.1 Peta Kota Surakarta



Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Surakarta, 2021

Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta, menurut RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
Batas Selatan	: Kabupaten Sukoharjo
Batas Timur	: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (2Km)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,810	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta.

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW dengan jumlah RT sebanyak 2.786. Kecamatan Banjarsari memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 14,810 km² dan Kecamatan Serengan memiliki wilayah paling kecil, yaitu 3,083 km². Dengan kondisi ini, Kecamatan Banjarsari memiliki kelurahan terbanyak yaitu 15 kelurahan, dan paling sedikit di Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 7 kelurahan. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 195 dengan jumlah RT sebanyak 930. Jumlah RW dan RT yang paling kecil adalah Kec, Serengan yaitu sebanyak 72 RW dan 313 RT.

B. Kondisi Geografis

Kota Surakarta secara geografis berada antara 110°45'15"- 110°45'35" Bujur Timur dan 7°36'00"- 7°56'00" Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang menunjang kota-kota lainya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Solo" termasuk daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian antara ±92 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lahan antara 0% hingga 15%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi topografi Kota Surakarta ditinjau dari ketinggian dan kemiringan lahan tiap kecamatan.

Tabel 4.2 Kondisi Topografi Kota Surakarta

Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)	Kemiringan Tanah
Kec. Laweyan	90 – 100	0 – 2 %
Kec. Serengan	80 – 100	0 – 2 %
Kec. Pasar Kliwon	80 – 95	0 – 2 %
Kec. Jebres	90 – 120	2 – 15%
Kec. Banjarsari	85 – 100	0 – 2 %
Kota Surakarta	80 - 120	0 – 15%

Sumber: BPS Kota Surakarta (2021)

Kota Surakarta tergolong dalam iklim tropis, yaitu memiliki bulan kering mencapai 5 bulan (Mei-September) dan bulan basah sebanyak 7 bulan (Oktober-April) dengan suhu rata-rata 24,8°C sampai 18,1°C. Tingkat Kelembaban tergolong sedang yaitu berkisar antara 66-84%. Sedangkan penyinaran matahari di Kota Surakarta tertinggi terjadi pada bulan Agustus atau September dengan radiasi matahari antara 80-84%, sementara penyinaran terendah terjadi pada bulan Desember atau Januari dengan radiasi matahari sekitar 48 – 50%. Tekanan udara antara 1.007-1011 atmosfer, rata-rata sebesar 1.010 atmosfer. Kondisi Curah hujan pada tahun 2011 sebesar 2.548,50 mm/th, lebih rendah dibandingkan tahun 2010 sebesar 3.408 mm/thn dan tahun 2009 sebesar 2.332,5 mm/th.

C. Kondisi Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa Kota Surakarta memiliki satu Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang membawahi 6 Sistem Pusat Pelayanan Kota.

Tabel 4.3 Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta Tahun 2011-2031

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arah Fungsi Kawasan
1	I	Kec. Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan	Pariwisata Budaya, Perdagangan dan jasa, olahraga, Industri kreatif
2	II	Kec. Banjarsari, dan Laweyan	Pariwisata, olahraga, Industri kreatif

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arah Fungsi Kawasan
3	III	Kec. Banjarsari	Permukiman, perdagangan dan jasa
4	IV	Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres	Permukiman, perdagangan dan jasa, Industri kecil dan industri ringan
5	V	Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres	Pariwisata, Pendidikan Tinggi, Industri kreatif
6	VI	Kec. Banjarsari, Kec. Jebres, Kec. Laweyan	Pemerintahan, Pariwisata budaya, Perdagangan dan Jasa

Sumber: RTRW Kota Surakarta, 2011-2031

D. Kondisi Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor tumpuan bagi Kota Surakarta, tercermin dari pertumbuhan dalam hal jumlah unit usaha. Hingga tahun 2021 tercatat 1.173 unit usaha kecil dan menengah di Kota Surakarta, serta 156 usaha kreatif dan 5710 usaha non formal yang berpotensi mencakup pelaku usaha level mikro. Keberadaan UMKM Kota Surakarta memiliki jumlah lebih baik dibanding daerah berkarakteristik urban lainnya di wilayah Jawa Tengah (Padwangi, 2019). Badan Pusat Statistik Kota Surakarta mencatat bahwa hingga tahun 2021 terdapat 261 usaha menengah, 912 usaha kecil, dan 5710 usaha kreatif dan non formal di mana usaha mikro berpotensi masuk di dalamnya. Jumlah unit usaha menurun sebesar 5,09% dibanding tahun 2020.

Tabel 4.4 Pertumbuhan UMKM di Kota Surakarta

Jenis Industri	Tahun		Pertumbuhan
	2020	2021	
Menengah	275	261	-5.09%
Kecil	960	912	-5.00%
Kreatif	164	156	-4.88%
Non Formal	6010	5710	-4.99%
Total Pertumbuhan			-4.99%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022

Secara lebih spesifik dalam mengklasifikasikan UMKM berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, terdapat 43.804 unit UMKM per tahun 2017 di Kota Surakarta. Kuantitas ini terdiri dari 41.512 usaha berskala mikro, 2.197 usaha berskala kecil, dan 95 usaha berskala menengah. Meski begitu, dari

besarnya jumlah unit UMKM tersebut hanya sebanyak 2.978 unit usaha saja yang sudah menjadi UMKM binaan Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian, masih terdapat 40.826 unit usaha potensial untuk dikembangkan melalui program-program pendampingan dan pembinaan. Pembinaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM di Kota Surakarta terus berfokus pada upaya pemasaran produk yang selama ini terkendala karena kebanyakan ritel atau lapak modern memberikan persyaratan berupa ijin produk atau sertifikasi-sertifikasi lainnya.

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Surakarta terus menunjukkan arah yang signifikan. Dapat dilihat secara umum penyerapan tenaga kerja daerah tidak terlepas dari kontribusi UMKM (Sathish & Rajamohan, 2018). UMKM yang ada di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 96%. Berdasarkan data tahun 2018 jumlah usaha mikro mencapai 58,91 juta, jumlah usaha kecil sejumlah 59,260 juta, jumlah usaha menengah 4,987 juta. Di Indonesia, total UMKM pada tahun 2018 mampu menyerap sebanyak 64,2 juta.

Sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Industri Kreatif dan Nonformal yang memungkinkan menyerap usaha mikro di Kota Surakarta mampu menyerap sebanyak 33.027 tenaga kerja. Sektor usaha kecil dan menengah menyerap paling banyak tenaga kerja yaitu sebesar 16.422 tenaga kerja pada tahun 2021. Sementara itu, jumlah penduduk angkatan kerja di Kota Surakarta adalah 282.178 penduduk, dimana 260.025 atau 92,15% dari penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan penduduk yang memiliki pekerjaan.

Tabel 4.5 Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surakarta

Skala Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja	
	2020	2021
Besar	13.391	12.435
Menengah	7.850	7.458
Kecil	8.572	8.143
Kreatif	164	941
Non Formal	16.441	15.619

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2022)

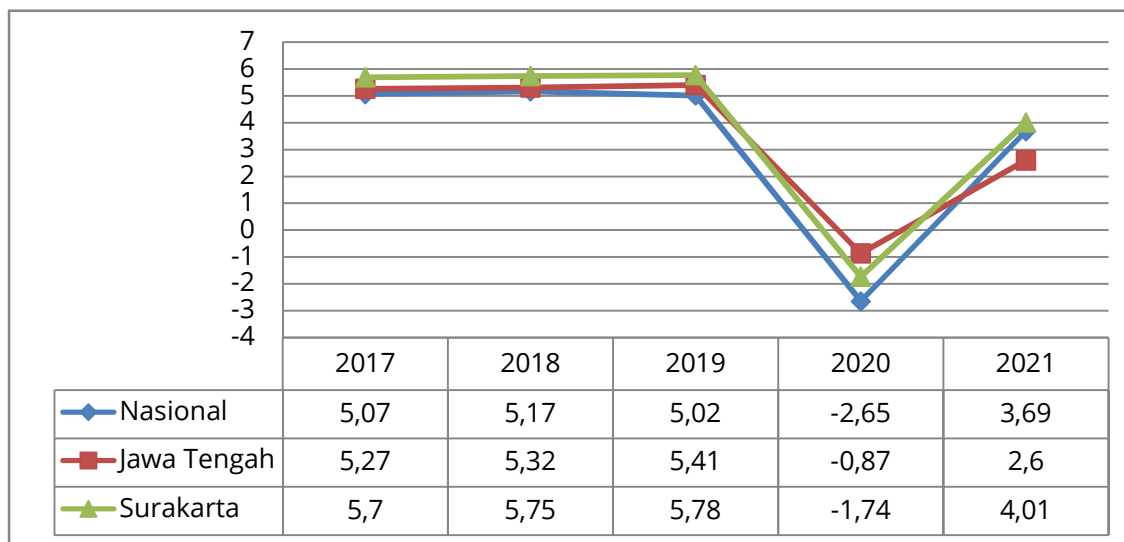
E. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi daerah dan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari nilai dan sebaran PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu

daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2010.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat fluktuasi, meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2018 dan 2019 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 0,3%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pada periode tahun 2018 sampai dengan 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta diatas Jawa Tengah, sedangkan tahun 2020 dikarenakan pandemi, pertumbuhan ekonomi nasional hingga daerah mengalami penurunan, terlihat Surakarta mengalami penurunan 1,74% lebih turun daripada Jawa tengah yang hanya turun sebesar 0,87%. Namun pada tahun 2021 kondisi perekonomian menunjukkan perbaikan dimana Kota Surakarta bertumbuh sebesar 4,01% lebih baik dibanding dengan pertumbuhan Jawa Tengah maupun Nasional yang masing-masing bertumbuh 2,60% dan 3,69%

Pada tahun 2021 sektor primer di Kota Surakarta terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan total mencapai Rp. 253,64 milyar. Sektor sekunder dengan sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi memberikan kontribusi total sebesar Rp. 17.963,60 miliar. PDRB sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor tersier mendominasi struktur ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2021. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta secara keseluruhan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surakarta mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun 3 tahun terakhir.

Tabel 4.6 PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)

Kategori		2019	2020	2021	Pertumbuhan	
					2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	233429,16	243785,19	253396,56	4,44%	3,94%
B	Pertambangan dan Penggalian	289,08	281,6	243,11	-2,59%	-13,67%
C	Industri Pengolahan	4059986,4	4017388,59	4362549,95	-1,05%	8,59%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	94467,61	95469,58	105672,66	1,06%	10,69%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68562,82	74921,49	71493,11	9,27%	-4,58%
F	Konstruksi	13008931,3	12878839,7	13423876,1	-1,00%	4,23%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10635516,5	10306413,8	11061382,8	-3,09%	7,33%
H	Transportasi dan Pergudangan	1241375,56	491167,78	524376,11	-60,43%	6,76%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2596798,29	2167235,46	2379346,01	-16,54%	9,79%
J	Informasi dan Komunikasi	5764427,29	6929679,08	7486879,25	20,21%	8,04%

	Kategori	2019	2020	2021	Pertumbuhan	
					2020	2021
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1805302,07	1856884,85	1968240,07	2,86%	6,00%
L	Real Estate	1846239,69	1890733,35	1974896,2	2,41%	4,45%
M, N	Jasa Perusahaan	414236,87	387892,84	402026,46	-6,36%	3,64%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2594387,03	2567427,62	2574052,99	-1,04%	0,26%
P	Jasa Pendidikan	2643711,13	2688467,54	2740938,83	1,69%	1,95%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	535372,96	622766,87	635796,69	16,32%	2,09%
R, S, T, U	Jasa Lainnya	456680,62	402465,17	406397,27	-11,87%	0,98%
Produk Domestik Regional Bruto		47999714,4	47621820,5	50371564,2	-0,79%	5,77%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta tahun 2021 adalah Rp 50.371,56 miliar, atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan PDRB senilai Rp 47.621,82 miliar. Angka tersebut didominasi oleh sektor Konstruksi dengan sumbangan Rp 13.423,87 miliar, dan paling sedikit di sektor Pertambangan dan Penggalian dengan sumbangan hanya Rp 0,243 miliar. Surakarta menjadi penyumbang PDRB tertinggi ke-2 Kota di bawah Semarang dan berada di urutan ke-5 Kota/ Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Tabel 4.7 PDRB Kota Surakarta atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)

	Kategori	2019	2020	2021	Pertumbuhan	
					2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146185,4	149001,9	152191,7	1,93%	2,14%
B	Pertambangan dan Penggalian	185,49	174,08	148,36	-6,15%	-14,77%
C	Industri Pengolahan	2707251	2598564	2757755	-4,01%	6,13%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79648,25	80914,24	86460,08	1,59%	6,85%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	58986,31	60886,07	58270,83	3,22%	-4,30%
F	Konstruksi	9088768	8909743	8971026	-1,97%	0,69%
G	Perdagangan Besar	8205089	7779824	8227241	-5,18%	5,75%

	Kategori	2019	2020	2021	Pertumbuhan	
					2020	2021
	dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	1030898	386201,8	399568,6	-62,54%	3,46%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1759782	1474706	1599051	-16,20%	8,43%
J	Informasi dan Komunikasi	5393513	6455884	6951672	19,70%	7,68%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1181579	1206749	1234324	2,13%	2,28%
L	Real Estate	1476561	1482893	1533566	0,43%	3,42%
M, N	Jasa Perusahaan	280665,5	256718,4	262333,8	-8,53%	2,19%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1800423	1761679	1758277	-2,15%	-0,19%
P	Jasa Pendidikan	1495587	1481237	1483179	-0,96%	0,13%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	379101	425010,2	430202,7	12,11%	1,22%
R, S, T, U	Jasa Lainnya	356884,8	305778,9	305982	-14,32%	0,07%
	Produk Domestik Regional Bruto	35441108	34815965	36211248	-1,76%	4,01%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022

Tabel 4.8 Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019-2021

	Kategori	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,49	0,51	0,5
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
C	Industri Pengolahan	8,46	8,44	8,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,2	0,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,16	0,14
F	Konstruksi	27,1	27,04	26,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,16	21,64	21,96
H	Transportasi dan Pergudangan	2,59	1,03	1,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,41	4,55	4,72
J	Informasi dan Komunikasi	12,01	14,55	14,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	3,9	3,91

Kategori		2019	2020	2021
L	Real Estate	3,85	3,97	3,92
M, N	Jasa Perusahaan	0,86	0,81	0,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,41	5,39	5,11
P	Jasa Pendidikan	5,51	5,65	5,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,12	1,31	1,26
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,95	0,85	0,81
A	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022

Kinerja perekonomian Kota Surakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. PDRB ADHK pada tahun 2020 tercatat sebesar 47.644,56 miliar rupiah, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 48.003,06 miliar rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Kota Surakarta. Laju pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir mulai membaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun terakhir adalah 4,01%.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha Kota Surakarta tahun 2019-2021, dari 17 sektor-sektor penyusun PDRB tersebut kontribusi per sektoral didominasi oleh sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor komunikasi dan informasi. Pada tahun 2021, kontribusi sektor konstruksi menyumbang 26,65%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 21,96%, dan sektor komunikasi dan informasi sebesar 14,86%.

F. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebanyak 522.728 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.171 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.657 jiwa. Sedangkan rasio jenis kelamin di Kota Surakarta sebesar 0,968. Dilihat dari tren perkembangan jumlah penduduk pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan sebesar 0,07% pada tahun 2021. Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 11.187,52 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.861,13 jiwa/km².

Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah penduduk	516.102	517.887	575.230	522.364	522.728
	laki-Laki	250.896	251.772	283.295	257.043	257.171
	Perempuan	265.206	266.115	291.935	265.321	265.557
2.	% Laju Pertumbuhan	0,376	0,346	0,97	0,44	0,07
3.	Rasio Jenis kelamin	0,95	0,95	0,97	0,969	0,968
4.	Kepadatan Penduduk (² km/jiwa)	11.718,78	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.73 jiwa atau sebanyak 32,31% dari keseluruhan populasi Surakarta, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.853 jiwa atau sebesar 9,15% dari total populasi Surakarta.

Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Laweyan	88.578	9.705,64
2	Serengan	47.853	15.522,17
3	Pasar Kliwon	78.565	16.094,02
4	Jebres	138.859	9.658,38
5	Banjarsari	168.873	11.069,13
	Surakarta	522.728	11.187,52

Sumber: BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2021

G. Isu Strategis RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surakarta 2005-2025, dan secara spesifik dalam jangka yang lebih singkat lagi terutama untuk menghadapi dampak pandemi global Covid-19 yang luas, perlu diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif,

(iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara bottom-up dengan top-down planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Adapun kebijakan terkait dengan isu strategis pada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah:

1. Tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal

Isu strategis berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan adalah:

- a. Pemetaan sumber daya aparatur berbasis sistem merit
- b. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
- c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat
- d. Optimalisasi layanan fungsi DPRD
- e. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektornik
- f. Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- g. Penguatan kerja sama regiona, kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan kelompok masyarakat
- h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik
- i. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran, dan pemanfaatan inovasi daerah
- j. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

2. Pembangunan sumber daya manusia yang sehat, kreatif, berkarakter, unggul dan tangguh

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian falsafah budaya Jawa ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- c. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing
- d. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja
- e. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
- f. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk
- g. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan
- h. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya

3. Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan

Perkembangan ekonomi dalam era industri 4.0 dibutuhkan sebagai salah satu perkembangan industri yang harus diikuti. Seiring dengan perkembangan era industri 4.0, Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap mempertahankan aspek perkembangan sejarah kuno dan kini yang telah terjadi, untuk melihat kondisi nanti perkembangan dan daya saing ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan era industri 4.0 yang terjadi mengakibatkan perkembangan dunia digital/cyber berlangsung secara cepat. Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama pemangku kepentingan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pariwisata dengan fokus: kota MICE, Wiskulja dan Ekonomi Digital berbasis konsep Eco Cultural City
- b. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif: bauran ekonomi digital dengan ekonomi konvensional mewujudkan Smart City
- c. Penguatan budaya cinta kota dan produk kota bagi generasi muda sebagai duta daya saing ekspor
- d. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan
- e. Peningkatan daya tarik investasi
- f. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi
- g. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

4. Infrastruktur dan lingkungan kota yang sehat, nyaman, berbudaya dan tangguh

Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan budaya-budaya lokal, memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan budaya lokalnya. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota Budaya adalah sebagai berikut:

- a. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan budaya
- b. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi
- c. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat
- d. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim

5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan kota yang kondusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

- a. Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- b. Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana

H. Terobosan Strategi melalui Perencanaan Berbasis Penelitian dan Pembangunan Berbasis Perencanaan

Terkait dengan perencanaan pembangunan, isu-isu strategis RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 memberikan dukungan penuh terhadap daya saing dan inovasi daerah. Rencana Pembangunan ini mengangkat isu yang terkait erat dengan kolaborasi, penerapan inovasi, kreativitas, *sustainability*, dan pengangkatan nilai budaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam 5 tahun kedepan. Artinya, RPJMD

Kota Suraakrta 2021-2026 memberikan perhatian penuh terhadap *sustainability* dan kemampuan bersaing Kota Surakarta, terutama melalui penerapan teknologi digital dan informatika. Lebih dari itu, dukungan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 terhadap daya saing daerah merupakan perencanaan strategis yang relevan karena penunjang terhadap daya saing daerah merupakan kebutuhan yang mendesak terlebih yang bersentuhan dengan penerapan inovasi teknologi dan digitalisasi terutama di masa 5 tahun ke depan yang merupakan tahun-tahun responsif dan adaptif terhadap pemulihan akibat dampak pandemi global *Covid-19*.

BAB V

ANALISIS DAYA SAING DAERAH

A. Identifikasi Peluang/ Kendala & Inventarisasi Urgensi

PDRB Kota Surakarta tahun 2021 adalah Rp 50.371.564.200.000,- mengalami kenaikan sebesar 5,77% dibandingkan dengan PDRB tahun 2020 sebesar Rp 47.621.820.500.000. Sektor konstruksi merupakan penyumbang PDRB tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan kontribusi sebesar 26,65% pada tahun 2021. Angka tersebut diikuti oleh sumbangan dari sektor Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 21,96% terhadap PDRB Kota Surakarta. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang tidak populer di Kota Surakarta karena hanya menyumbang kurang dari 0,01% terhadap PDRB Kota Surakarta, dan angka tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021.

Secara rinci, proporsi penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB Kota Surakarta terbagi ke dalam Rumah Tangga, Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), dan Pemerintah. Pada tahun 2021 penggunaan konsumsi akhir terhadap PDRB terbesar adalah dari Rumah Tangga, yaitu sebesar Rp 25.450,82 miliar. Pada tahun 2021 proporsi penggunaan PDRB untuk konsumsi adalah sebesar 60,69%.

Tabel 5.1 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Surakarta 2018-2020 (miliar rupiah)

Uraian	2019	2020	2021
Konsumsi Akhir (ADHB)			
a. Rumah Tangga	24.210,99	24.540,85	25.450,82
b. LNPR	312,57	291,07	308,21
c. Pemerintah	5.090,82	4.566,20	4.809,27
Jumlah	29.614,38	29.398,12	30.568,30
PDRB ADHB	48.002,28	47.644,56	50.371,56
Proporsi Konsumsi	61,69%	61,70%	60,69%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Tabel 5.2 Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50.44	51.53	50.53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0.65	0.61	0.61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.61	9.59	9.55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	70.57	64.29	67.78
5. Perubahan Inventori	0.61	0.63	0.61
6. Net Ekspor	-32.87	-26.65	-29.08

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021
PDRB Pengeluaran	100.00	100.00	100.00

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik (Kota Surakarta), tetapi diperdagangkan ke luar Kota Surakarta. Untuk menghasilkan produk yang diekspor dihitung menggunakan modal, atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sementara itu sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang-barang modal. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi modal (PMTB). Berdasarkan Surakarta dalam Angka (BPS Kota Surakarta) Net ekspor barang dan jasa Kota Surakarta tahun 2021 adalah -14.646,18 miliar rupiah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar -12.690,88.

Rasio Perbandingan PDRB terhadap Impor memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data rasio tersebut dapat menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan dari luar Kota Surakarta. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi dan sebaliknya.

Tabel 5.3 Rasio Ekspor terhadap PMTB Kota Surakarta (Miliar Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021
Konsumsi Akhir (ADHB)			
Total Nilai Ekspor (ADHB)	18,444.11	15,662.37	14,879.25
Total Nilai PMTB (ADHB)	33,871.41	30,617.43	29,086.55
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0.54%	0.51%	0.51%

Sumber: Surakarta dalam Angka 2022 (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta)

B. Analisis Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta 2022

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Indonesia disusun mengacu pada Kuesioner Pemetaan Ekosistem Inovasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kuesioner IDSD tersusun berdasarkan 4 aspek yang terdiri dari 12 pilar, dan 23 dimensi, dan secara spesifik memuat 97 indikator yang dijadikan item pengukuran.

Pada tahun 2022 Kota Surakarta telah menjawab seluruh 97 indikator dengan data dukung yang relevan, sehingga dapat diukur perkembangan tingkat daya saing pada Kota Surakarta. Dari 97 indikator yang diukur dengan skala 1 (level daya saing paling rendah) hingga skala 5 (level daya saing paling tinggi), terdapat hasil yang

variatif. Meski begitu, daya saing Kota Surakarta sudah didominasi oleh level 5 yaitu sebanyak 68 indikator. Sementara itu hanya terdapat 3 indikator saja yang merupakan level daya saing 1, dan 5 indikator yang merupakan level daya saing 2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki kecenderungan berdaya saing sangat baik. Daya saing Kota Surakarta ini didukung oleh sektor konstruksi, perdagangan, dan informasi komunikasi terhadap PDRB. Skor IDSD 2022 tidak mengalami perubahan signifikan apabila dibandingkan dengan IDSD 2021. Meskipun beberapa indikator mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya beberapa yang lainnya mengalami kenaikan, namun secara kumulatif malah terdapat kenaikan pada indikator dengan level 5, yang semula sebanyak 67 menjadi 68.

Berdasarkan sebaran level, secara umum terjadi peningkatan kemampuan daya Saing Surakarta dari tahun 2021 ke tahun 2022, dicerminkan oleh meningkatnya jumlah indikator yang berada di level 5. Pada tahun 2020 terdapat 67 indikator yang berada pada level 5, meningkat menjadi 69 indikator pada tahun 2021. Perubahan ini tidak sejalan dengan indikator dengan level 1, dimana pada tahun 2021 terdapat 3 indikator dengan level 1, pada tahun 2022 terdapat 4 indikator.

Tabel 5.4 Sebaran Level Daya Saing Kota Surakarta 2021-2022

No.	Level Indikator IDSD	2021	2022
1	Level 1	3	4
2	Level 2	5	5
3	Level 3	12	7
4	Level 4	10	12
5	Level 5	67	69
JUMLAH INDIKATOR		97	97

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2022

Tabel 5.5 Perkembangan IDSD 2021-2022

No.	Status Progres IDSD	Juml. Indikator
1	Mengalami Penurunan	2
2	Sama	91
3	Mengalami Kenaikan	4
JUMLAH		97

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2022

Berdasarkan tabel 4.1 terdapat indikator yang mengalami peningkatan maupun penurunan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Indikator-indikator yang mengalami peningkatan meliputi:

1. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari skor 3 menjadi 4.
2. Persentase peningkatan APBD terhadap PDRB meningkat dari skor 3 menjadi 4.
3. Nilai Tukar Petani meningkat dari skor 3 menjadi 4.
4. Persentase Keluhan Kesakitan atau JPKK meningkat dari skor 3 menjadi 5.

Adapun indikator yang mengalami penurunan adalah:

1. Persentase Peningkatan UMKM terhadap UKM dari skor 4 menjadi 2.
2. Pertumbuhan Nilai Ekspor dari skor 2 menjadi 1.

Sementara itu masih terdapat beberapa indikator yang belum dioptimalkan data dukungnya baik karena belum tersedia maupun belum terverifikasi. Data-data yang belum diperoleh meliputi:

1. Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Usaha dari tahun sebelumnya.
2. Persentase industri yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak.
3. Jumlah startup yang terdaftar di inkubator bisnis.
4. Jumlah kolaborasi perguruan tinggi, lembaga litbang dan pemerintah.
5. Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD.

Tabel 5.6 Nilai IDSD Kota Surakarta Tahun 2021-2022 berdasarkan Indikator

No	Indikator	2020	2021	2022
1	Regulasi apa saja yang dijadikan Pedoman dalam menentukan besaran biaya administrasi perizinan memulai bisnis/industri kecil, menengah dan besar?	5	5	5
2	Berapa Rata-rata durasi waktu pengurusan administrasi izin berusaha yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memulai bisnis/industry?	5	3	3
3	Berapa persentase peningkatan jumlah perizinan usaha dari tahun sebelumnya?	5	5	5
4	Berapa persentase industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada?	4	5	5
5	Bagaimana persentase Pertumbuhan usaha/industri kecil dan menengah?	4	5	5
6	Bagaimana persentase pertumbuhan usaha/industri besar? (Untuk Tingkat Provinsi)	3	5	5

No	Indikator	2020	2021	2022
7	Bagaimana sistem manajemen produk hasil industri kecil dan menengah? (Bisa dalam bentuk SOP dan sertifikat ISO)	5	5	5
8	Bagaimana sistem manajemen produksi hasil industri besar (dalam bentuk sertifikat ISO)? (Untuk Tingkat Provinsi)	5	5	5
9	Berapa jumlah perusahaan sosial (social enterprise) yang sudah terdaftar oleh Pemerintah Daerah?	5	5	5
10	Berapa Jumlah perusahaan Startup yang terdaftar di inkubator bisnis perguruan tinggi/Balitbangda/inkubator bisnis swasta?	4	4	4
11	Bagaimana implementasi Program sistem Inovasi Daerah?	5	5	5
12	Bagaimana keberadaan dan pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang dan Masyarakat?	5	5	5
13	Berapa jumlah Kolaborasi antara Perguruan Tinggi, Lembaga dan atau litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	4	5	5
14	Berapa jumlah perjanjian kerja sama antara industri/dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir?	4	5	5
15	Berapa jumlah kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Litbang, Industri/Badan Usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 2 tahun terakhir? (Bisa dalam bentuk dokumen MOU/ Perjanjian Kerjasama/undangan)	5	5	5
16	Berapa Skor/Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun terakhir?	5	5	5

No	Indikator	2020	2021	2022
17	Berapa jumlah artikel ilmiah jurnal yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi / internasional selama 2 tahun terakhir?	5	5	5
18	Berapa jumlah penelitian yang dihasilkan Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	4	5	5
19	Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, hak cipta, indikasi geografis, design Industri, dll) di daerah yang sudah didaftarkan secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 2 tahun terakhir?	5	5	5
20	Bagaimana Jumlah paten yang telah dimanfaatkan di industri?	4	5	5
21	Berapa Persentase anggaran penelitian dan pengembangan terhadap total APBD?	4	4	4
22	Berapa persentase kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) terhadap jumlah penelitian dari Perguruan Tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya?	5	5	5
23	Berapa persentase jumlah peneliti di Perguruan Tinggi dan perangkat daerah kelitbangan dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan dalam 2 tahun terakhir?	5	5	5
24	Peringkat perguruan tinggi di daerah secara nasional? (Perguruan Tinggi yang berlokasi di daerah dan memiliki Peringkat/Ranking Tertinggi)	5	5	5
25	Berapa Jumlah dunia usaha dan Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan?	5	5	5
26	Berapa Jumlah Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kelitbangan?	5	5	5
27	Bagaimana jumlah Perguruan tinggi dan institusi kelitbangan di daerah yang telah melakukan komersialisasi inovasi?	5	5	5

No	Indikator	2020	2021	2022
28	Adakah dan Bagaimanakah kondisi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Techno Park?	5	5	5
29	Berapa Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon/Smartphone?	5	5	5
30	Berapa proporsi rumah tangga yang mengakses internet?	5	5	5
31	Berapa Produk Inovasi Teknologi yang sudah di Komersialisasikan?	5	5	5
32	Apakah hasil penetapan tingkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional berdasarkan Kementerian Dalam Negeri?	5	5	5
33	Apakah hasil Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	5	3	4
34	Apakah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	2	4	2
35	Apakah hasil Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Kementerian PAN dan RB?	3	4	4
36	Berapa hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)?	4	5	5
37	Berapa capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi ?	3	5	5
38	Bagaimana Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan ?	5	5	5
39	Berapa Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) ?	5	5	5
40	Berapa rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor ?	5	5	5
41	Berapa rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)?	4	5	5
42	Berapa persentase rumah tangga berakses air minum layak ?	3	3	5

No	Indikator	2020	2021	2022
43	Berapa besar persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)?	1	2	2
44	Berapa rasio elektrifikasi ?	5	5	5
45	Berapa besar pertumbuhan ekonomi?	4	5	5
46	Berapa Indeks Kapasitas Fiskal daerah ?	4	4	4
47	Berapa persentase peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun sebelumnya?	2	3	4
48	Berapa Persentase peningkatan anggaran pemerintah daerah (APBD) terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun sebelumnya?	3	3	4
49	Berapa Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) untuk tahun terakhir?	4	4	4
50	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN Berdasarkan Data tahun terakhir?	5	5	5
51	Berapa Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA Berdasarkan Data tahun terakhir?	3	1	1
52	Berapa Persentase peningkatan UMKM terhadap UKM dari tahun sebelumnya?	3	4	2
53	Berapa Persentase Angka Kemiskinan pada tahun terakhir?	3	2	2
54	Berapa persentase Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun terakhir?	4	3	4
55	Berapa besarnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) pada tahun terakhir?	5	5	5
56	Berapa Persentase balita gizi buruk pada tahun terakhir?	5	5	5
57	Berapa Persentase Jumlah Balita Stunting pada tahun terakhir?	5	5	5
58	Berapa Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun terakhir?	5	5	5

No	Indikator	2020	2021	2022
59	Berapa Persentase antara Jumlah Penduduk yang mengalami Keluhan Kesehatan dan terganggunya aktivitas (JPKK) dengan jumlah Penduduk pada tahun terakhir	4	3	5
60	Berapa nilai Angka Harapan hidup pada tahun terakhir?	5	5	5
61	Berapa Rasio puskesmas per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	4	5	5
62	Berapa Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1.000 Penduduk pada tahun terakhir?	2	5	5
63	Rasio dokter dan medis terhadap per 100.000 (seratus ribu) penduduk pada tahun terakhir?	5	5	5
64	Berapa Angka Harapan Lama Sekolah?	4	4	4
65	Berapa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)?	3	3	3
66	Berapa Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi?	1	1	5
67	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk?	3	3	5
68	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan D4/S1 terhadap total jumlah penduduk	5	5	5
69	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S2 terhadap total jumlah penduduk?	3	4	5
70	Berapa Persentase jumlah penduduk berpendidikan S3 terhadap total jumlah penduduk?	3	3	5
71	Berapa persentase Angka Partisipasi Kasar siswa SMA/SMK/Sederajat?	4	5	5
72	Berapa kenaikan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun ini dan tahun sebelumnya?	5	5	5
73	Berapa jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)?	5	5	5

No	Indikator	2020	2021	2022
74	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Literasi Digital Penduduk?	5	5	5
75	Bagaimana pola dan karakteristik pola kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar)?	5	5	5
76	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Poktan/Gapoktan yang aktif?	5	5	5
77	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha asosiasi pedagang pasar yang aktif?	5	5	5
78	Berapa persentase Kelembagaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang aktif?	5	5	5
79	Berapa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	2	2	4
80	Berapa Kontribusi Retribusi Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)?	5	5	5
81	Apakah ada Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan menekan laju inflasi di daerah?	5	5	5
82	Bagaimana Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)?	2	2	5
83	Berapa Presentase Penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))?	5	5	2
84	Bagaimana Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)? (dalam persentase)	4	1	5
85	Berapa Indeks Pembangunan Gender (IPG)?	5	5	5
86	Berapa Persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja?	4	5	5
87	Berapa Persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu?	5	5	5
88	Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga kerja terampil?	5	5	5

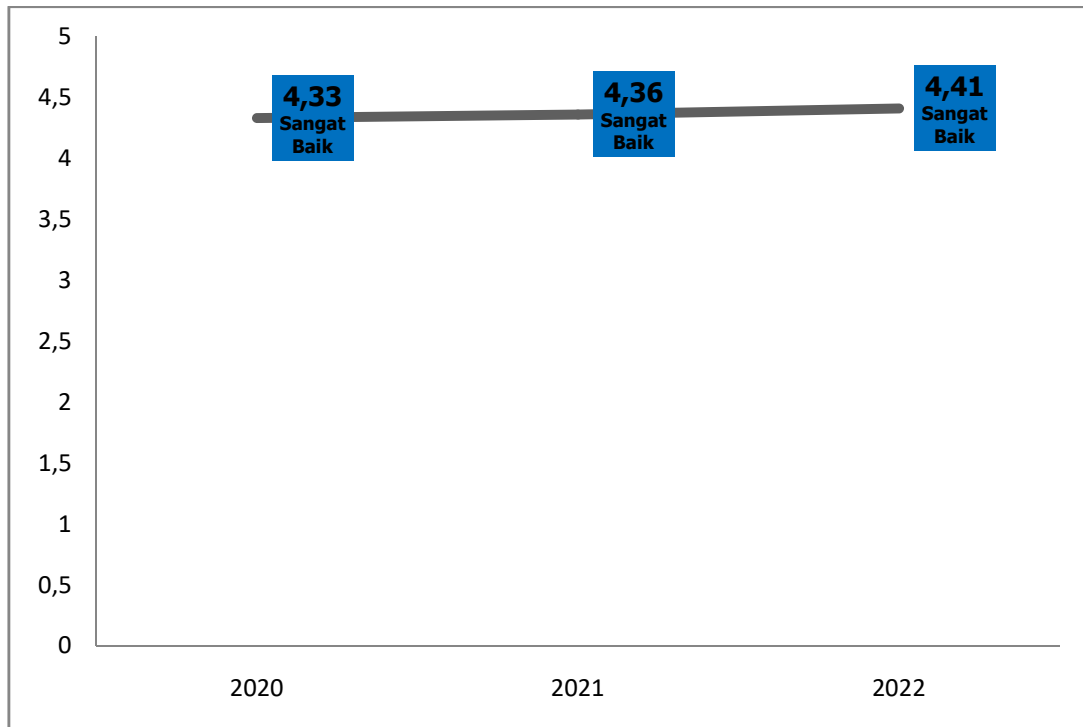
No	Indikator	2020	2021	2022
89	Berapa Persentase jumlah Bank di Daerah yang Memberi Layanan Pinjaman Kepada Dunia Usaha?	5	5	5
90	Berapa Persentase jumlah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Layanan Pinjaman kepada Dunia Usaha?	5	5	5
91	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	2	3	3
92	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha?	5	4	4
93	Berapa Persentase Pertumbuhan Kredit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada Petani dan/atau Nelayan?	3	3	3
94	Bagaimana ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah?	4	5	5
95	Berapa Rasio Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun keatas dibanding Jumlah Penduduk? (dalam presentase)	5	5	5
96	Berapa presentase pertumbuhan nilai ekspor?	5	2	1
97	Berapa Nilai Neraca Perdagangan Antar Wilayah di Tingkat Provinsi (dalam triliun rupiah)?	5	3	3

Sumber: Hasil Analisis IDSD 2022

Dengan adanya peningkatan jumlah indikator yang berada di level 5 dibarengi dengan menurunnya indikator yang berada di level 3, serta lebih banyaknya indikator yang mengalami peningkatan level dibandingkan dengan indikator yang mengalami penurunan, Kota Surakarta diindikasikan mengalami peningkatan kemampuan dalam hal daya saing. Peningkatan kemampuan berdaya saing pada level nasional tersebut secara umum berlaku baik dalam hal enabling environment, sumber daya manusia, luasnya pasar, dan ekosistem inovasi. Kondisi ini diharap sejalan dengan peningkatan kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik, maupun penerapan teknologi dan informasi baik pada Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat pada umumnya.

C. Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta 2020-2022

Berdasarkan data dukung sementara yang telah diperoleh, skor IDSD tahun 2022 diproyeksikan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 maupun 2020. Skor IDSD 2022 diproyeksikan mencapai angka 4,41 atau lebih baik daripada tahun 2021 dengan skor 4,36 dan tahun 2020 dengan skor 4,33.



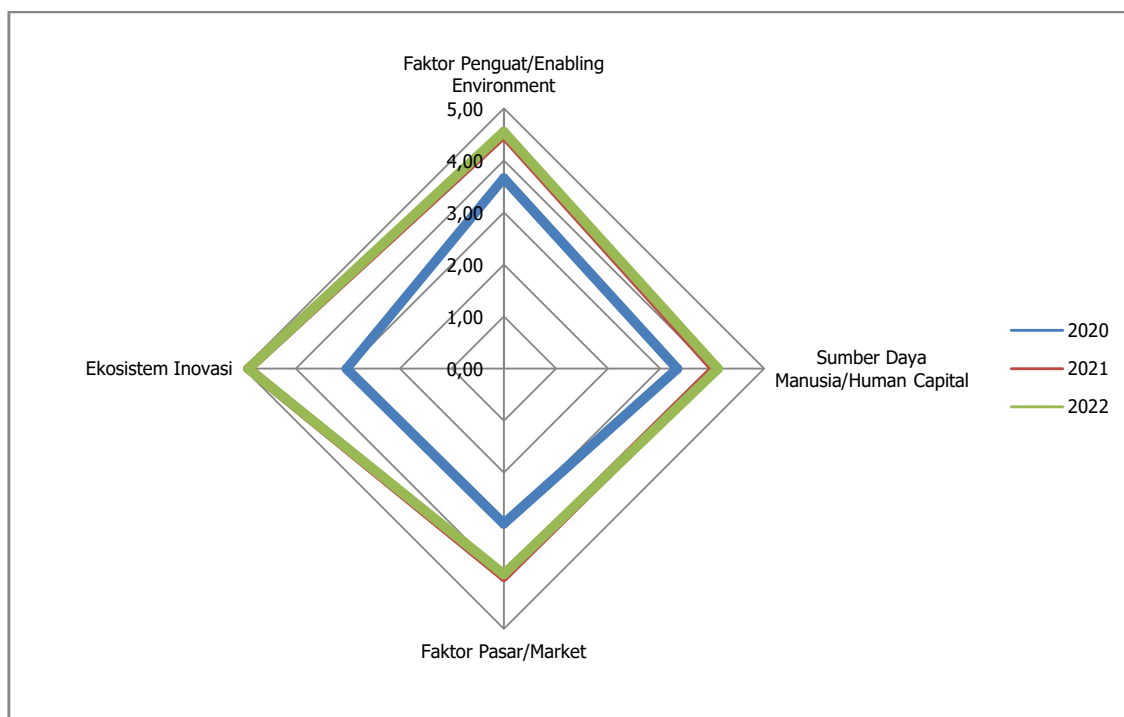
Gambar 5.1 Nilai Indeks Daya Saing Kota Surakarta 2020-2022

Berdasarkan aspek, Faktor Penguat Kota Surakarta diproyeksikan memperoleh nilai 4,55 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan skor 4,50. Sumber Daya Manusia juga mengalami peningkatan dimana skor tahun 2022 adalah 4,11 dibanding tahun 2021 sebesar 4,05. Ekosistem Inovasi berada di angka 4,91 tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun 2021. Sementara itu Faktor Pasar mengalami penurunan dimana tahun 2022 skornya adalah 3,95 dan tahun 2021 dengan skor 4,00.

Tabel 5.7 Skor IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Aspek Tahun 2020-2022

No.	Aspek	2020	2021	2022
1	Faktor Penguat/Enabling Environment	3,66	4,50	4,55
2	Sumber Daya Manusia/Human Capital	3,33	4,05	4,11
3	Faktor Pasar/Market	2,98	4,00	3,95
4	Ekosistem Inovasi	3,02	4,91	4,91

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2022



Gambar 5.2 IDSD Surakarta berdasarkan Aspek Tahun 2020-2022

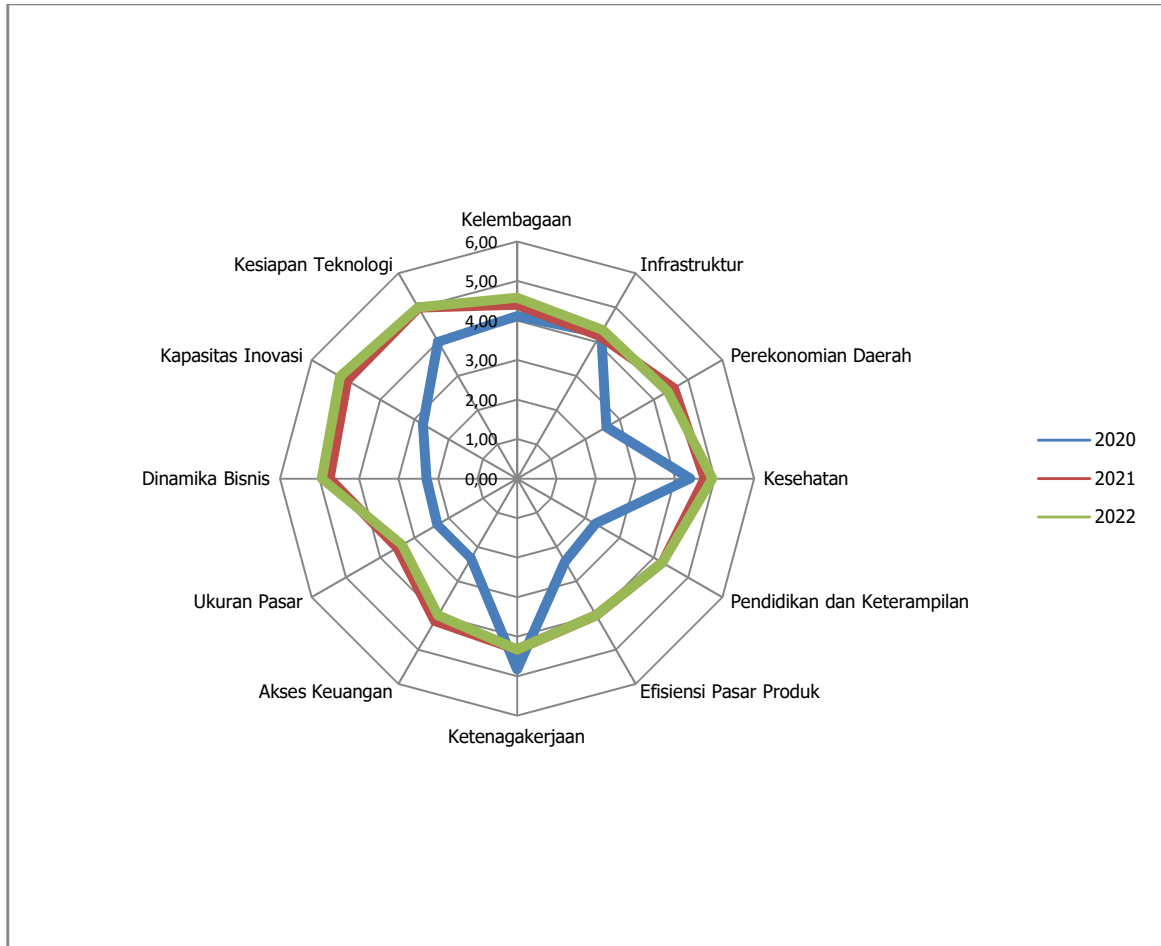
Berdasarkan Pilar, skor tertinggi terdapat pada dimensi Kapasitas Inovasi dan Kesiapan Teknologi dimana Kota Surakarta memperoleh skor 5,00. Kapasitas inovasi meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 dimana skornya adalah 4,97. Ukuran pasar adalah dimensi yang paling rendah di tahun 2022 karena hanya memperoleh skor 3,36 bahkan angka ini menurun dibandingkan dengan 2021 di mana skornya adalah 3,50. Pilar kelembagaan dan infrastruktur juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 Kota Surakarta memperoleh masing-masing 4,58 dan 4,34. Meskipun begitu Akses keuangan dan Perekonomian Daerah mengalami penurunan, dimana tahun 2022 Kota Surakarta memperoleh 4,00 dan 4,41.

Tabel 5.8 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar Tahun 2020-2022

No.	Pilar	2020	2021	2022
1	Kelembagaan	4,12	4,40	4,58
2	Infrastruktur	4,25	4,17	4,34
3	Perekonomian Daerah	2,61	4,59	4,41
4	Kesehatan	4,38	4,75	4,94
5	Pendidikan dan Keterampilan	2,29	4,25	4,25
6	Efisiensi Pasar Produk	2,42	4,00	4,00
7	Ketenagakerjaan	4,83	4,33	4,33
8	Akses Keuangan	2,33	4,17	4,00
9	Ukuran Pasar	2,33	3,50	3,36
10	Dinamika Bisnis	2,29	4,75	4,94

No.	Pilar	2020	2021	2022
11	Kapasitas Inovasi	2,75	4,97	5,00
12	Kesiapan Teknologi	4,00	5,00	5,00

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2022



Gambar 5.3 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Pilar tahun 2020-2022

Pada tahun 2022 tidak ada satu pilar pun dari Kota Surakarta yang menghasilkan skor kurang dari 3,00 serta terdapat 2 dimensi yang menghasilkan nilai sempurna yaitu 5,00 meliputi Kapasitas Inovasi dan Kesiapan Teknologi.

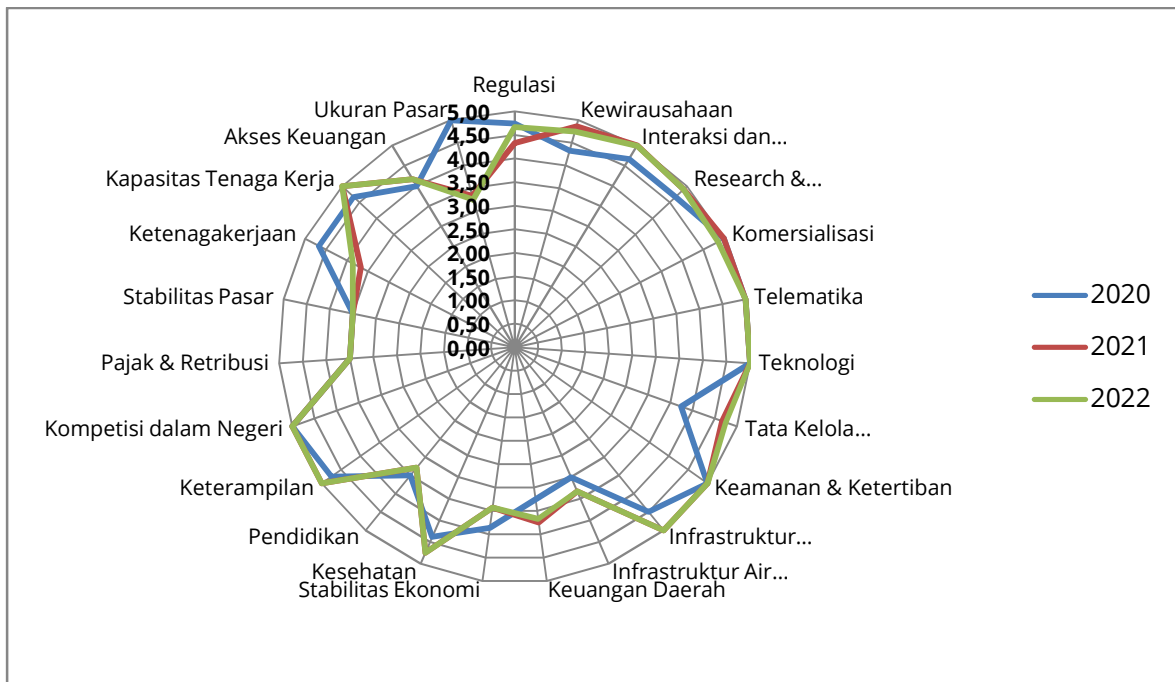
Pada tahun 2022, dimensi yang berkontribusi paling besar bagi daya saing Kota Surakarta antara lain adalah Keamanan & Ketertiban; Infrastruktur Transportasi; Keterampilan; Kompetisi Dalam Negeri; Kapasitas Tenaga Kerja; Regulasi; Komersialisasi; Telematika; serta Teknologi karena masing-masing dimensi menyumbang skor 5,00. Terdapat juga beberapa dimensi yang menyumbang skor di atas 4,50 antara lain Tata Kelola Pemerintahan (4,75); Kesehatan (4,75); dan Kewirausahaan (4,75). Sementara itu, beberapa dimensi masih menunjukkan skor yang kurang bagus, atau masih berada di bawah angka 3,50, antara lain adalah

Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan (3,33); Stabilitas Ekonomi (3,43); Pendidikan (3,29); dan Ukuran Pasar (3,25).

Tabel 5.9 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi 2020-2022

No.	Dimensi	2020	2021	2022
1	Regulasi	4,75	4,33	4,67
2	Kewirausahaan	4,33	4,86	4,75
3	Interaksi dan Keberagaman	4,67	5,00	5,00
4	Research & Development	4,67	4,90	4,90
5	Komersialisasi	5,00	5,00	4,86
6	Telematika	5,00	5,00	5,00
7	Teknologi	5,00	5,00	5,00
8	Tata Kelola Pemerintahan	3,75	4,67	4,75
9	Keamanan & Ketertiban	5,00	5,00	5,00
10	Infrastruktur Transportasi	4,50	5,00	5,00
11	Infrastruktur Air Bersih, RTH & Kelistrikan	3,00	3,33	3,33
12	Keuangan Daerah	3,25	3,75	3,67
13	Stabilitas Ekonomi	3,86	3,43	3,43
14	Kesehatan	4,38	4,75	4,75
15	Pendidikan	3,50	3,29	3,29
16	Keterampilan	4,75	5,00	5,00
17	Kompetisi dalam Negeri	5,00	5,00	5,00
18	Pajak & Retribusi	3,50	3,50	3,50
19	Stabilitas Pasar	3,50	3,50	3,50
20	Ketenagakerjaan	4,67	3,67	3,86
21	Kapasitas Tenaga Kerja	4,67	5,00	5,00
22	Akses Keuangan	4,00	4,17	4,17
23	Ukuran Pasar	5,00	3,33	3,25

Sumber: Hasil Pengukuran IDSD 2021



Gambar 5.4 IDSD Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi tahun 2020-2022

Secara keseluruhan, daya saing Kota Surakarta berdasarkan dimensi pada tahun 2022 merupakan yang terbaik apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021. Peningkatan terjadi pada dimensi Regulasi, dimana pada tahun 2021 skor yang diperoleh adalah 4,67 meningkat dari tahun sebelumnya (4,33). Peningkatan juga terjadi pada dimensi Infrastruktur Tata Kelola Pemerintahan, dimana skor 4,67 pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,75 pada tahun 2022. Meskipun secara keseluruhan tahun 2022 merupakan yang terbaik berdasarkan dimensi, masih terdapat 4 dimensi yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021.

Apabila direfleksikan dalam bentuk diagram radar seperti pada gambar 5.3, diindikasikan bahwa semakin luas cakupan wilayah maka semakin mendekati kemampuan daya saing yang sempurna. Kota Surakarta menunjukkan progress bahwa tahun 2021 semakin meningkat kemampuan daya saing daerahnya berdasarkan dimensi, direfleksikan dengan cakupan area yang semakin luas atau memenuhi keseluruhan radar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan pemetaan Indeks Daya Saing Kota Surakarta tahun 2022, serta analisis trend IDSD tahun 2018-2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kota Surakarta merupakan daerah yang memiliki tingkat daya saing sangat baik. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2021 sampai 2022 indikator yang mengalami kenaikan ada 4 indikator, sedangkan yang mengalami penurunan hanya ada 2 indikator, sisanya 91 indikator masih sama. Daya saing Kota Surakarta ini di dukung oleh sektor kontruksi, perdagangan, dan informasi komunikasi terhadap PDRB. Sektor konstruksi merupakan penyumbang PDRB tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan kontribusi mencapai 27% pada tahun 2021.
2. Secara umum Indeks daya saing daerah kota Surakarta tahun 2022 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan skor 4,411. Indikator yang mengalami penurunan adalah indikator yang bersifat makro, hal ini dipengaruhi olehh faktor kondisi saat ini dimana Kota Surakarta masih mulai beradaptasi dan mencoba bangkit setelah pandemi Covid-19. Sedangkan indikator yang bersifat mikro jangka Panjang cenderung stabil dan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 Indeks Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan dari 97 indikator menunjukan sebaran level daya saing sudah di dominasi pada level 5 yaitu sebanyak 69 indikator, sementara terdapat 4 indikator yang merupakan level 1, 5 indikator di level 2, 7 indikator di level 3 dan 12 indikator di level 4.
3. Indeks Daya Saiang Kota Surakarta berdasarkan aspek, pada tahun 2022 skor tertinggi terdapat pada aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta, di urutan kedua pada aspek Faktor Penguat, disusul Sumber Daya Manusia. Secara keseluruhan, skor pada keempat aspek pada tahun 2022 merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan skor pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun secara parsial skor Faktor Pasar masih kalah dengan raihan tertinggi yang pernah diperoleh Kota Surakarta (4,00), namun peningkatan secara akumulatif terjadi pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Skor Faktor Penguat meningkat dari 4,50 menjadi 4,55 pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Skor Sumber Daya Manusia juga mengalami peningkatan dari 4,05 menjadi 4,11 pada tahun 2022.

4. Indeks daya saing Kota Surakarta berdasarkan Pilar pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan pilar IDSD yang paling berkontribusi terhadap kemampuan daya saing Kota Surakarta adalah Kapasitas Inovasi dan Kesiapan Teknologi, yaitu dengan masing-masing skor 5,00 atau berada pada tingkat yang paling puncak. Setelah itu, terdapat pilar lain yang menyumbang skor lebih dari 4,50 antara lain adalah Dinamika Bisnis dengan skor 4,94, pilar Kesehatan dengan skor 4,94 dan pilar Kelembagaan dengan skor 4,85. Sementara itu, terdapat 3 pilar yang masih berada pada skor di bawah 4,00 antara lain adalah pilar Ukuran Pasar dengan skor 3,36.
5. Secara keseluruhan Indeks Daya Saing Kota Surakarta berdasarkan dimensi pada tahun 2022 merupakan yang terbaik dibanding tahun 2020-2021. Dimensi yang memberikan kontribusi paling besar bagi daya saing Kota Surakarta antara lain adalah Keamanan & Ketertiban; Infrastruktur Transportasi; Keterampilan; Kompetisi Dalam Negeri; Kapasitas Tenaga Kerja; Telematika; serta Teknologi karena masing-masing dimensi menyumbang skor 5,00. Terdapat juga beberapa dimensi yang menyumbang skor di atas 4,50 antara lain Tata Kelola Pemerintahan (4,75); Kesehatan (4,75); Research & Development (4,90); Regulasi (4,67); Komersialisasi (4,86) dan Kewirausahaan (4,75).

B. Proyeksi Indeks Daya Saing Kota Surakarta tahun 2023

Berdasar pada RPJMD Tahun 2021-2026, tahun 2023 merupakan tahun perencanaan ketiga untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta lima tahun ke depan. Melalui arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yang ditujukan untuk “Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan jumlah startup digital yang terus dibina untuk maju ke tahap unicorn;
2. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan jaminan sosial;
3. Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE (*meeting, incentive, conference, dan exhibition*), Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital berbasis konsep *Eco Cultural City*;
4. Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif;
5. Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;

6. Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - a. Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga
 - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya local
 - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha
 - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional
 - e. Pengentasan Kemiskinan
 - f. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya.
7. Pengembangan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
8. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai budaya lokal mewujudkan kota cerdas (*smart city*).

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, tingkat optimisme hasil Indeks Daya Saing Kota Surakarta ditahun 2023 akan mengalami tetap bertahan dan bisa untuk diupayakan lebih baik dari tahun 2022. Setidaknya, apabila belum mampu mencapai level perbaikan, diharapkan dapat meningkatkan jumlah nilai pada masing-masing indikator.

C. Rekomendasi

1. Rekomendasi Kebijakan berdasarkan hasil analisis IDSD Kota Surakarta 2021

Berdasarkan hasil pengisian terhadap kuesioner IDSD tahun 2022, masih terdapat 4 indikator yang menempatkan Kota Surakarta pada level 1, dan 5 indikator pada level 2. Dengan kata lain, masih terdapat 9 hal yang sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan untuk memperbaiki kemampuan daya saing Kota Surakarta di level nasional. Mengacu pada 9 indikator yang masih memperoleh skor level 1 (paling rendah) dan 2, serta temuan-temuan lapangan maupun data *desk* yang dijadikan bukti fisik pengisian kuesioner IDSD, terdapat hal yang perlu dipertimbangkan bagi seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, dunia usaha, akademi, masyarakat, dan media) dalam peningkatan daya saing Kota Surakarta, yaitu adalah:

- a. Jumlah nilai investasi berskala PMA Kota Surakarta pada tahun 2021 hanya sebesar US\$ 958.800 dan berada pada level 1. Untuk mencapai peningkatan ke level 2, Kota Surakarta perlu mencapai angka investasi berskala PMA sebesar US\$

250.000.000,00 - 500.000.000,00. Strategi untuk meningkatkan investasi berskala PMA adalah:

- 1) Melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap perusahaan-perusahaan digital dengan status kepemilikan luar negeri;
 - 2) Perbaikan dan pengembangan dalam *ease of use*, daya tarik visual, dan prosedur pengurusan yang singkat pada *Online Single Submission* (OSS) untuk menarik investor asing;
 - 3) Melakukan penelusuran dan inventarisasi terhadap universitas-universitas di Surakarta yang memiliki mahasiswa dari luar negeri, serta transaksi tenaga ahli atau profesional yang jasanya digunakan oleh perusahaan/ instansi dari luar negeri.
 - 4) DPMPTSP telah melakukan usaha pencatatan aktivitas perdagangan, termasuk ekspor-impor secara online melalui lapak online, namun perlu diperdalam lagi terutama dalam kegiatan pencatatan pada perusahaan/ pengusaha yang melakukan kegiatan titip ekspor (melalui kota lain).
- b. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi Jawa Tengah adalah 23,86% atau berkisar pada angka <86,2. Untuk naik ke level lebih atas dibutuhkan APK Perguruan Tinggi antara 86,02-105,02 atau setidaknya lebih dari APK PT nasional saat ini yaitu 31%. Adapun strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Kota Surakarta meliputi:
- 1) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi negeri/ swasta, dan dunia usaha terkait program beasiswa, magang, dan penempatan kerja untuk meningkatkan minat studi lanjut;
 - 2) Peningkatan kapasitas perguruan tinggi-perguruan tinggi kecil untuk merger dengan perguruan tinggi besar, sehingga dapat menarik minat calon mahasiswa baru;
 - 3) Pemerintah Kota Surakarta mendukung program *Cyber Education* atau lokapasar digital untuk matakuliah daring yang berkualitas, sehingga mahasiswa dari kampus yang kurang SDM atau materi pembelajaran bisa ikut berpartisipasi dalam perkuliahan yang diselenggarakan beberapa PT papan atas yang tergabung dalam *Cyber Education*.
- c. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah sebesar 7,85 sehingga menempatkan pada level 1. Untuk naik ke level 2, Kota Surakarta harus mampu menurunkan TPT menjadi 6 hingga kurang dari 7. Dengan demikian beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh Kota Surakarta antara lain:

- 1) Peningkatn jumlah peserta pelatihan di BLK terutama untuk pelatihan startup bisnis;
 - 2) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pada inkubator bisnis di Solo Technopark;
 - 3) Dukungan penciptaan kewirausahaan baru, dan pendampingan hingga ke tahap naik kelas, peningkatan kapasitas kewirausahaan yang menyerap tenagakerja.
 - 4) Program *skill development fund* ke dalam Rencana Pembangunan Kota Surakarta termasuk *upskilling* dan *reskilling* wirausaha yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar saat ini.
- d. Pada tahun 2020 nilai ekspor Kota Surakarta menurun hingga 50%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan namun masih berada di angka 0,17%. Pertumbuhan ini menempatkan Surakarta pada level 1. Diperlukan pertumbuhan nilai ekspor mencapai lebih dari 3% untuk naik level. Dengan demikian beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap produk unggulan daerah;
 - 2) Pendataan kembali produk asli/ lokal yang dibawa ke luar daerah untuk diekspor (menghindari tidak tercatatnya transaksi ekspor produk Surakarta yang dilakukan oleh eksportir local yang lokasi transaksinya dilakukan di Kota lain);
 - 3) Mendorong produsen lokal Surakarta untuk membuat produk substitusi atau pengganti produk impor dengan melakukan standarisasi produk dan pemasaran produk asli yang masif.
- e. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta masih rendah yaitu sebesar 9,75%, atau hanya berada di level 1. Untuk mencapai level 2, Kota Surakarta perlu memiliki antara 10-15 % RTH. Untuk meningkatkan persentase RTH, Kota Surakarta dapat mengupayakan antara lain:
- 1) Kota Surakarta memiliki RTH yang masih belum disurvei dan didata. Dengan survei dan pendataan ulang diharapkan persentase RTH dapat meningkat;
 - 2) Pengukuran dan pendataan kembali KDH untuk mengantisipasi jumlah RTH yang belum dihitung;
 - 3) Menyesuaikan isu yang tengah berkembang dalam lingkup global, Kota Surakarta perlu mendukung aksi penghijauan kembali dan pencegahan pemanasan global melalui pembebasan lahan untuk didirikan RTH, pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya dan danau buatan.

- f. Persentase angka kemiskinan masih besar yaitu 9%, meskipun angka ini tidak berbeda jauh dengan angka provinsi maupun nasional, tapi berdasarkan indeks daya saing, persentase angka kemiskinan tersebut masih relatif tinggi atau berada di level 2. Angka kemiskinan Kota Surakarta harus menyentuh kurang dari 8% untuk mencapai level 3. Upaya peningkatan level dapat dilakukan Kota Surakarta melalui:
- 1) Pendampingan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga *charity* atau badan amal untuk mengalokasikan anggaran sumbangan untuk kebutuhan pembiayaan usaha, sehingga amal tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan menciptakan masyarakat yang sejahtera secara berkelanjutan;
 - 2) Fasilitasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan bank/ non bank, serta lembaga penyalur amal & zakat untuk distribusi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran atau tepat guna;
 - 3) Dorongan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan besar di Kota Surakarta untuk melaksanakan CSR yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan pembangunan kewirausahaan.
- g. Ralisasi pendapatan pajak daerah Kota Surakarta pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp 182.195.246.198, sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta adalah Rp 238.386.003.287. Dengan demikian persentase pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 76,43%. Angka ini menempatkan Kota Surakarta pada level 4. Namun demikian, angka ini masih bisa terus didorong untuk mencapai angka 80% sehingga Surakarta dapat berada pada level 5. Upaya yang dapat didorong Kota Surakarta untuk meningkatkan pajak daerah adalah:
- 1) Monitoring dan evaluasi pajak & retribusi untuk menghindari kebocoran penyetoran pajak;
 - 2) Sosialisasi penggunaan insentif pajak UMKM;
- h. Masih terjadi tingkat ketimpangan ekonomi sebesar 0,36 atau berada di level 2. Kota Surakarta dapat menurunkan angka ketimpangan menjadi 0,30 - <0,35 untuk memperoleh status level 3 terkait penanganan ketimpangan. Meskipun angka ini mengacu pada angka provinsi, namun Kota Surakarta perlu untuk turut menurunkan angka ketimpangan tersebut. Untuk menurunkan tingkat ketimpangan perlu dilakukan upaya antara lain:
- 1) Prioritisasi pendidikan vokasi karena pendidikan vokasi dinilai memiliki serapan tenaga kerja lebih tinggi dibanding dengan pendidikan nonvokasi;

- 2) Menurunkan ketimpangan kekayaan. Sejauh ini pendapatan pajak penghasilan masih didominasi kalangan pekerja namun pajak penghasilan orang pribadi masih belum optimal. Padahal kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, dan pemilik modal memiliki kewajiban yang lebih besar pajaknya dibandingkan dengan pekerja.
- i. Meskipun terjadi peningkatan jumlah UMKM, namun dibandingkan dengan tahun 2020, presentasi peningkatan UMKM terhadap UKM mengalami penurunan. Pada tahun 2021 persentase peningkatan UMKM terhadap UKM di Kota Surakarta adalah 5,3% sehingga Surakarta hanya berada di level 2. Perlu terjadi peningkatan lebih dari 10% untuk meningkat ke level 3.
- 1) Meningkatkan anggaran kelitbangan terutama untuk Solo Technopark untuk terus mengembangkan inkubator bisnis;
 - 2) Memanfaatkan banyaknya para pelaku ekonomi kreatif untuk dibina dan mampu memasarkan produk kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2002). *Daya saing daerah: konsep dan pengukurannya di Indonesia: lampiran, Peta peringkat daya saing antar propinsi di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Barkley, D. L. (2008). Evaluations of regional competitiveness: Making a case for case studies. *Review of Regional Studies*, 38 (2), 121-143.
- Berger, T. (2008). Concepts of national competitiveness. *Journal of international Business and Economy*, 9 (1), 91-111.
- Bristow, G. (2005). Everyone's a 'winner': problematising the discourse of regional competitiveness. *Journal of economic geography*, 5 (3), 285-304.
- Catalán, S. G. (2021). Regional competitiveness in Latin America: a comparative study of the key elements for regional performance. *Investigaciones Regionales- Journal of Regional Research*, (50), 125-146.
- Chrobocinska, K. (2021). Comparative analysis of Regional Competitiveness in Poland from 2010-2019 in the Context of the Concept of Sustainable Development. *Sustainability*, 13(6), 3202.
- Coccia, M. (2011). The interaction between public and private R&D expenditure and national productivity. *Prometheus*, 29 (2), 121-130.
- Daryanto, A. (2004). Keunggulan daya saing dan teknik identifikasi komoditas unggulan dalam mengembangkan potensi ekonomi regional.
- De la Vega, J. C. S., Azorín, J. D. B., Segura, A. C. F., & Yago, M. E. (2019). A new measure of regional competitiveness. *Applied Economic Analysis*.
- Delgado, M., Ketels, C., Porter, M. E., & Stern, S. (2012). *The determinants of national competitiveness* (No. w18249). National Bureau of Economic Research.
- Dinata, R. J., & Hidayat, P. (2015). Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3 (1), 14831.
- Górski, M., Kochel, A., & Szymańska-Buzar, T. (2004). Synthesis, structure, and unusual reactivity of the first norbornene carbonyl complexes of tungsten. *Organometallics*, 23(12), 3037-3046.
- Huggins, R., Izushi, H., & Thompson, P. (2013). Regional competitiveness: theories and methodologies for empirical analysis. *Journal of CENTRUM Cathedra: The Business and Economics Research Journal*, 6 (2), 155-172.

- Institute for Management Development. (2017). IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017.
- Judrupa, I. (2021). Regional competitiveness as an aspect promoting sustainability of Latvia. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 650.
- Koraus, A. Mazak, M., Dobrovic, J. (2018). Quantitative analysis of th competitiveness of Benelux countries. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 5(4), 1069-1083.
- Noguiera, M., & Madaleno, M. (2021). New evidence of competitiveness based on the global competitiveness index. *Econ. Bull*, 41, 788-797.
- Parjaman, T., Soedarmo, U.R., & Enas, E. (2019). Penguatan kapasitas aparatur untuk meningkatkan daya saing daerah di era global. *Journal of Management Review*, 3(3), 29-42.
- Porter, M. (2003): The Economic Performance of Regions. *Regional Studies*, 37, 549-578.
- Ritonga, S. A. W., & Hidayat, P. (2015). Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3 (5), 14855.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Schwab, K. (2018). *The Global Competitiveness Report 2018*. World Economic Forum.
- Szczepaniak, I. Competitiveness–Systemic Approach. *KNOWLEDGE ECONOMY SOCIETY*, 217.
- World Economic Forum. (2022). *The Global Risk Report 2022 17th Ed*. ISBN: 978-2-940631-09-04. World Economic Forum.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon Surakarta, Jawa Tengah, 57111

Telp. (0271) 636 426

Website: litbang.surakarta.go.id | Email: balitbangdaska@surakarta.go.id; balitbangdaska@gmail.com